

**PROSES VERBAL
KONSEP SURAT DINAS**

1. Hal : Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017
2. Unit Konseptor :
 a. Eselon II : Sekretaris
 b. Eselon III : Kabag Evaluasi dan Pelaporan
3. Dasar Pembuatan :
 a. Surat dan Tanggal :
 b. Hal :
 c. Tanggal Terima Surat Masuk :

No	Keterangan	Nama	I		II		III		IV	
			Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	Tgl	Paraf
a.	Diketik dan diserahkan oleh JFU/JFT	Farida Arimurti, SE, MM	12/4/18							
b.	Direviu dan diserahkan oleh Eselon IV	Siti Juairiah, SE, M.Si	12/4/18							
c.	Direviu dan diserahkan oleh Eselon III	DR.Edi Puspito, SE, M.Si	12/4/18							
d.	Direviu dan disetujui oleh Eselon II	Suprodjo Wibowo, SE, M.Si	12/4/18							
e.	Direviu dan disetujui oleh Inspektur Jenderal	Justan R. Siahaan, Ak. M.Acc.Ca,QIA								

4. Catatan :

Yang mengajukan
Sekretaris

Suprodjo Wibowo
NIP.19701229199031003

Ditetapkan/Disetujui
Inspektur Jenderal

Justan Riduan Siahaan
NIP.19600220 198203 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 dapat diselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KPI).

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak baik instansi pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha tentang kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan pembangunan pertanian selama tahun 2017. Selain itu, laporan tahunan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan referensi untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan pengawasan pembangunan pertanian di tahun yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan laporan tahunan.

Jakarta, Februari 2018
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Suprodjo Wibowo, SE, M.Si
NIP. 197012291991031003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 dapat diselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KPI).

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak baik instansi pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha tentang kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan pembangunan pertanian selama tahun 2017. Selain itu, laporan tahunan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan referensi untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan pengawasan pembangunan pertanian di tahun yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan laporan tahunan.

Jakarta, Februari 2018
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Suprodjo Wibowo, SE, M.Si
NIP. 197012291991031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GAMBAR	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUJUAN	5
	C. RUANG LINGKUP	5
	D. VISI DAN MISI	5
BAB II	ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	6
	A. ORGANISASI	6
	B. SUMBER DAYA MANUSIA	9
BAB III	KERAGAAN ANGGARAN	12
	A. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN	12
	B. CAPAIAN KINERJA	19
BAB IV	KERAGAAN KEGIATAN	20
	A. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN	20
	B. KEGIATAN PENDUKUNG PENGAWASAN LAINNYA	45
	C. PENINGKATAN KAPABILITAS	58
	D. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	64
	E. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA	65
BAB VI	PENUTUP	66
LAMPIRAN		67

DAFTAR TABEL

1	Alokasi Anggaran Berdasarkan Belanja Tahun 2017	12
2	Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2017	13
3	Alokasi Anggaran Berdasarkan Output Inspektorat dan Sekretariat Tahun 2017	14
4	Realisasi Bulanan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2017	15
5	Realisasi Per Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017	16
6	Monitoring Penerbitan Laporan Perjalanan Dinas Tahun 2017	17
7	Monitoring Penerbitan Laporan Perjalanan Dinas yang belum Terbit Inspektorat Investigasi Tahun 2017	18
8	Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT Tahun 2017	21
9	Keragaan Tema Pengaduan Audit Investigasi dan Audit Tujuan Tertentu Tahun 2017	22
10	Keragaan Tema Audit Tujuan Tertentu Tahun 2017	23
11	Keragaan Tema Audit Barang Milik Negara Tahun 2017	25
12	Keragaan Kegiatan Pengawasan/Pendampingan dan Evaluasi Tahun 2017	26
13	Kegiatan Pengawasan CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2017	27
14	Kegiatan Perluasan Lahan Sawah Tahun 2016	30
15	Keragaan Hasil Evaluasi AKIP Eselon I Tahun 2017	37
16	Kegiatan Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017	46
17	Penilaian Maturitas SPIP Lingkup Eselon I Tahun 2017	48
18	Penilaian Maturitas SPIP Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017	48
19	Kegiatan Forum Nasional Sistem Pengendalian Intern	52
20	Laporan Unit Pengelola Gratifikasi Tahun 2017	54
21	Deskripsi Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun 2013 s.d. 2017	64
22	Data Nilai Kerugian Negara Per Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017	64

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015	7
2	Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015.	7
3	Struktur Organisasi Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi Itjentan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015.	8
4	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	9
5	Data Komposisi Fungsional Auditor	10
6	Data Komposisi Fungsional Tertentu	10
7	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	11
8	Data Pegawai Berdasarkan Rincian Golongan	11
9	Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan	13
10	Perkembangan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 Per Bulan dan Kumulatif	16
11	Monitoring Penerbitan Laporan Perjalanan Dinas	17
12	Kegiatan Forum Nasional Sistem Pengendalian Intern	50
13	Laporan Unit Pengelola Gratifikasi	55
14	Piagam Penghargaan Kementerian Pertanian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik	56
15	Pengaduan Masyarakat Tahun 2017	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pertanian tidak hanya menjadi urusan Kementerian Pertanian, akan tetapi pembangunan pertanian melibatkan lintas sektoral. Pembangunan pertanian melibatkan banyak lembaga/institusi pemerintah lainnya di pusat maupun pemerintah daerah. Sasaran strategis Kementerian Pertanian dalam Rencana Strategis tahun 2015 - 2019, telah menargetkan swasembada pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas. Berbagai persoalan dalam pembangunan pertanian yang menjadi penghalang keberhasilan pembangunan pertanian diantaranya: lahan, infrastruktur, sarana produksi, regulasi/kelembagaan, sumberdaya manusia dan permodalan.

Permasalahan mendasar pada sektor pertanian diuraikan sebagai berikut: (1) Alih fungsi lahan, konservasi lahan yang tidak terkendali, keterbatasan dalam pencetakan lahan baru, penurunan kualitas lahan, rata-rata kepemilikan lahan yang sempit dan ketidakpastian status kepemilikan lahan; (2) infrastruktur, kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun, terbatasnya jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, pos dan laboratorium perkarantina, kebun dan kandang penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas; (3) sarana produksi, belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi; (4) regulasi, beberapa kebijakan Pemerintah yang ditetapkan belum berjalan efektif dan belum berpihak pada sektor pertanian seperti Harga Pembelian Pemerintah (gabah) yang

hanya sedikit di atas biaya produksi, pengendalian harga penjualan (beras) agar tidak memicu kenaikan inflasi, pembebasan tarif bea masuk impor beberapa komoditas, serta pencegahan penyelundupan masuknya produk luar negeri belum maksimal; (5) kelembagaan dan sumberdaya manusia, kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat, keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi dan menurunnya minat generasi muda; (6) permodalan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan skema kredit dengan penjaminan seperti Kredit Usaha rakyat (KUR). Namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani. Hal ini disebabkan antara lain sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, oleh karena itu perbankan menerapkan prudential perbankan. Dampak dari penerapan prudential perbankan dirasakan petani seperti sulitnya akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan, terbatasnya sosialisasi dan informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya pendampingan dan pengawasan petani yang membutuhkan permodalan dari perbankan).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian, tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Bentuk konkrit dari penyelenggaraan pengawasan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai kebijakan bidang pertanian untuk memperoleh umpan balik, evaluasi akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kementerian Pertanian pada Tahun 2015 – 2019 menetapkan sasaran strategis, yaitu: (1) Pencapaian swasembada padi,

jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparat pemerintah yang baik.

Dalam pencapaian sasaran tersebut, Kementerian Pertanian telah menyusun dan akan melaksanakan 7 (tujuh) Strategi Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), meliputi: (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, dan (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian. Selain itu, Kementerian Pertanian telah menetapkan 9 (Sembilan) Strategi Pendukung sebagai berikut : (1) penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian, (2) peningkatan dukungan perkarantina, (3) peningkatan dukungan inovasi dan teknologi, (4) pelayanan informasi publik, (5) pengelolaan regulasi, (6) pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, (7) pengelolaan perencanaan, (8) penataan dan penguatan organisasi, dan (9) pengelolaan sistem pengawasan.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, didukung fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan lembaga pengawasan internal memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di internal Kementerian Pertanian. Kontribusi Inspektorat Jenderal dalam pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian ditunjukkan dengan pemberian saran dan rekomendasi strategis dalam perbaikan tata kelola keuangan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian kepada Menteri Pertanian, pengelola program (Eselon I) dan pengelola

kegiatan (Eselon II). Rekomendasi-rekomendasi strategis yang dimanfaatkan utamanya oleh pengelola program dan kegiatan, merupakan kinerja Inspektorat Jenderal. Pemberian rekomendasi strategis diarahkan pada *on going process*, sehingga perbaikan proses pembangunan pertanian dapat segera dilakukan oleh pengelola program dan kegiatan. Melalui rekomendasi strategis yang diberikan, diharapkan mampu mengurangi risiko-risiko pembangunan pertanian serta berdampak pada pencapaian hasil. Rekomendasi strategis tersebut dihasilkan melalui serangkaian kegiatan pengawasan intern berbasis risiko dan berbasis capaian (audit, reuiu, pengawalan, evaluasi dan pengawasan lainnya). Tuntutan dan tantangan Inspektorat Jenderal sebagai aparatur pengawas intern di Kementerian Pertanian kedepan semakin kuat dan berat dalam mendukung terwujudnya program pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal dituntut semakin profesional dan berintegritas. Sejalan dengan itu, maka Inspektorat Jenderal dituntut semakin meningkatkan kapabilitas pengawasannya agar mampu memberikan pelayanan di bidang pengawasan, melalui pematangan aktivitas pengawasan intern yang dilaksanakannya dan mengembangkan peta jalan (*road map*), pengembangan kapasitas (*capacity building*) pengawasan, perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*), penjaminan mutu (*quality assurance*), serta peningkatan efektivitas dan nilai tambah. Inspektorat Jenderal akan menguatkan strategi pembinaan dalam peningkatan maturitas SPIP di lingkup Kementerian Pertanian. Peningkatan maturitas SPIP di lingkup Kementerian Pertanian yang signifikan mampu mengurangi dan mengendalikan risiko yang dapat menghalangi kinerja program dan kegiatan sehingga pencapaian sasaran program dan kegiatan akan lebih baik. *Diagnostic assessment* dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal atau hasil pemetaan (*mapping*) bagi pimpinan unit kerja mengenai pemahaman atas SPIP, keberadaan infrastruktur SPIP, dan penerapan, dan penyelenggaraan SPIP pada suatu unit kerja secara menyeluruh. Hasil *assessment* diharapkan memberikan gambaran kondisi SPIP pada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian untuk mendapatkan gambaran capaian kinerja tahun 2017, maka disusunlah laporan tahunan ini.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan laporan tahun 2017 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang memadai tentang keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2017. Selain itu secara ringkas disampaikan pula hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan ditahun yang akan datang.

C. RUANG LINGKUP

Laporan Tahun 2017 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mencakup hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang mengacu pada Tugas dan Fungsi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

D. VISI DAN MISI

Penyusunan Laporan Tahun 2017 berpedoman pada visi dan misi Inspektorat Jenderal dan Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Itjen 2015 – 2019, Visi Inspektorat Jenderal adalah ***“Menjadi Pengawas Intern Mitra Pro-aktif Pengelola Program Pertanian dalam rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”***.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
3. Meningkatkan kapasitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

BAB II

ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

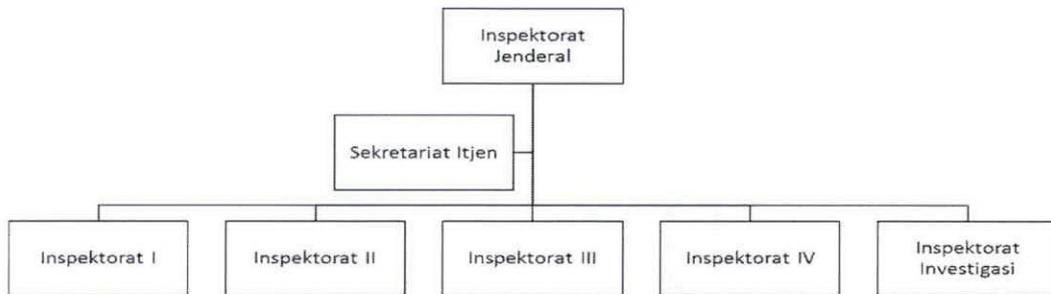
A. ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi; a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat Investigasi

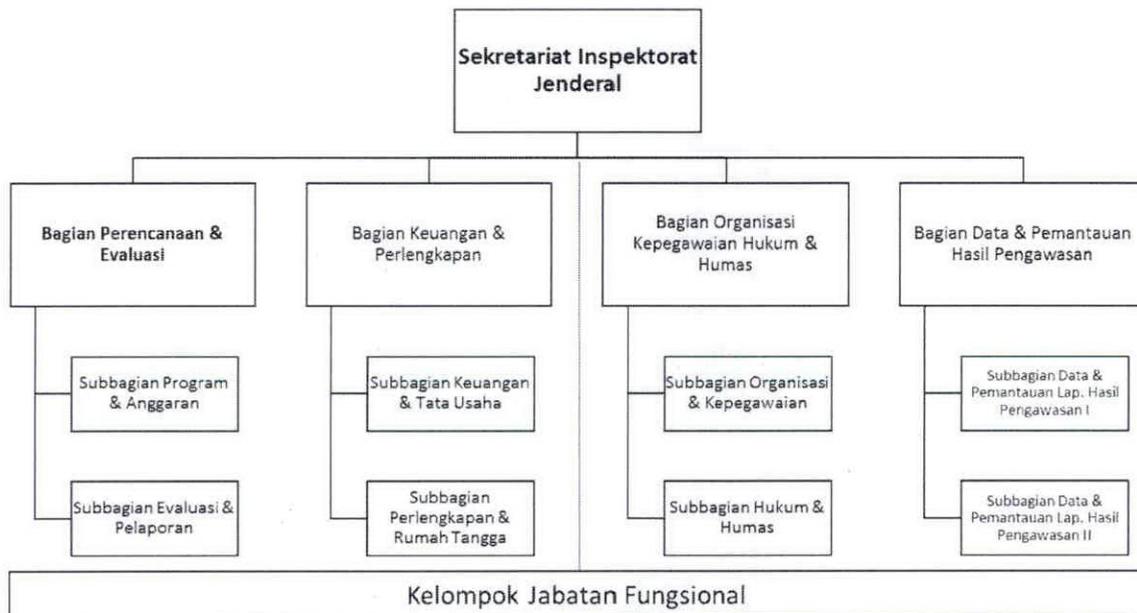
Bagan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 1.
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015

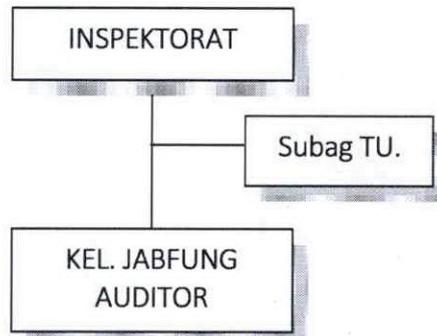


Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal seperti tampak pada gambar berikut:

Gambar 2.
Struktur Organisasi Sekretariat Itjen berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015



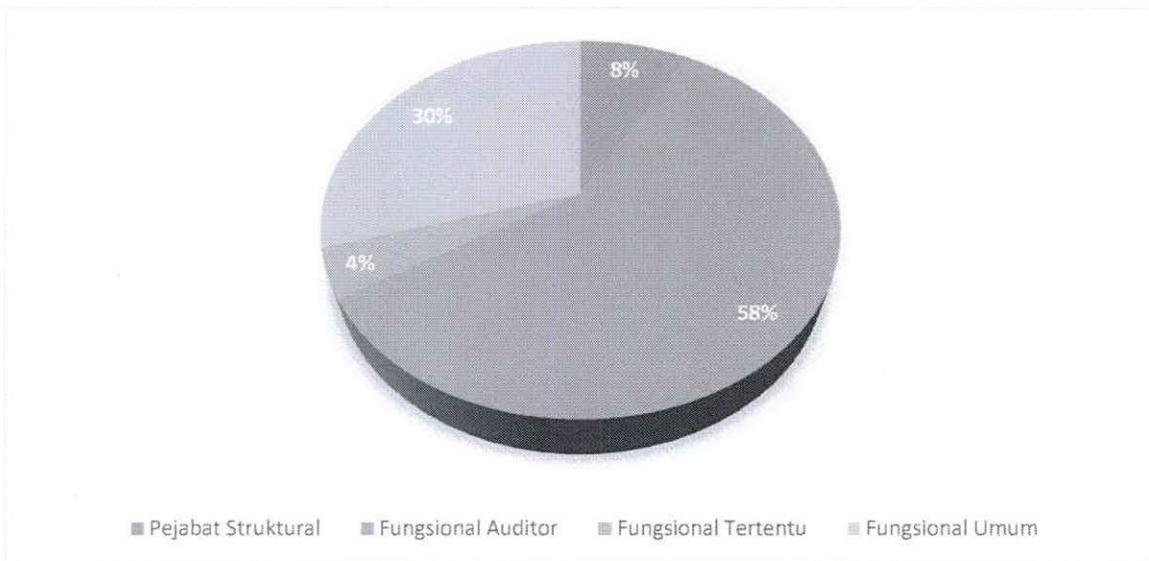
Gambar 3.
Struktur Organisasi Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi Itjentan
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015



B. SUMBER DAYA MANUSIA

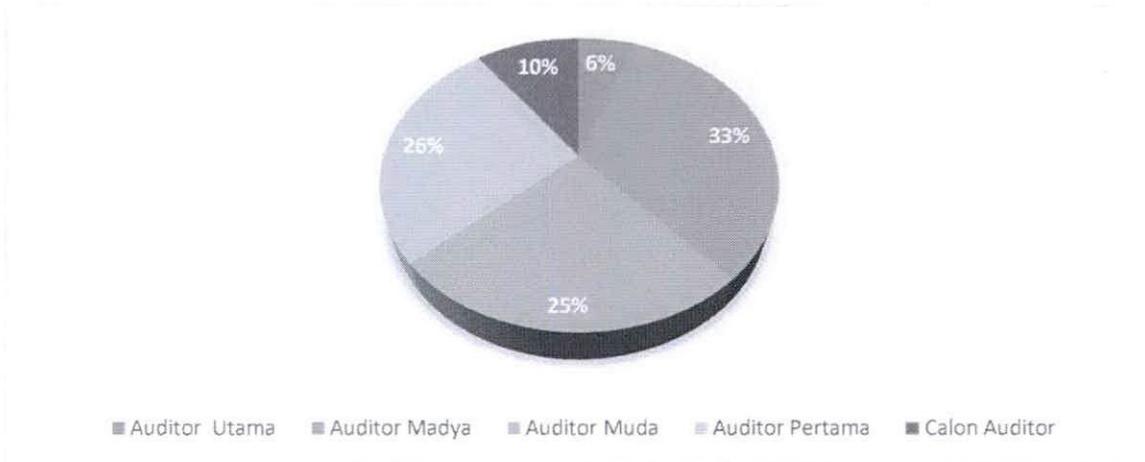
Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sampai dengan Desember 2017 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 287 pegawai dengan rincian sebagai berikut : 167 orang (58%) fungsional Auditor, 12 orang (4%) fungsional tertentu (fungsional kepegawaian, fungsional perencana, arsiparis dan pengelola PBJ), 23 orang (8%) pejabat struktural, dan 85 orang (30%) fungsional umum.

Gambar 4.
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan



Komposisi fungsional auditor yang berjumlah 167 orang dapat dijabarkan sebagai berikut : 9 orang (5%) Auditor Utama, 55 orang (33%) Auditor Madya, 42 orang (25%) Auditor Muda, 44 orang (26%) Auditor Pertama, dan 17 orang (10%) Calon Auditor, sebagaimana yang tergambar berikut ini:

Gambar 5.
Data Komposisi Fungsional Auditor



Komposisi fungsional tertentu yang berjumlah 12 orang terdiri dari 1 orang (8%) Analis Kepegawaian Pertama, 2 orang (17%) Analis Kepegawaian Penyelia, 1 orang (8%) Pranata Humas Pertama, 3 orang (25%) orang Perencana Muda, 1 orang (8%) Perencana Pertama, dan 3 orang (25%) Arsiparis Pertama, 1 orang (8%) Arsiparis Pelaksana.

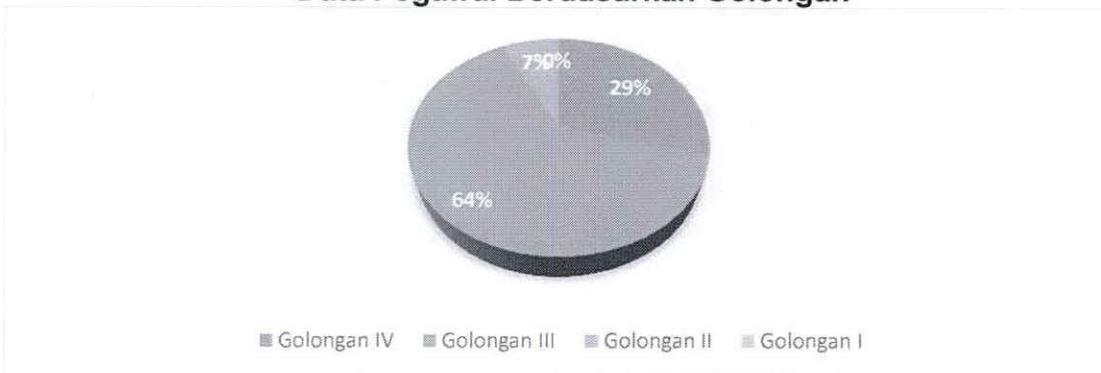
Gambar 6.
Data Komposisi Fungsional Tertentu



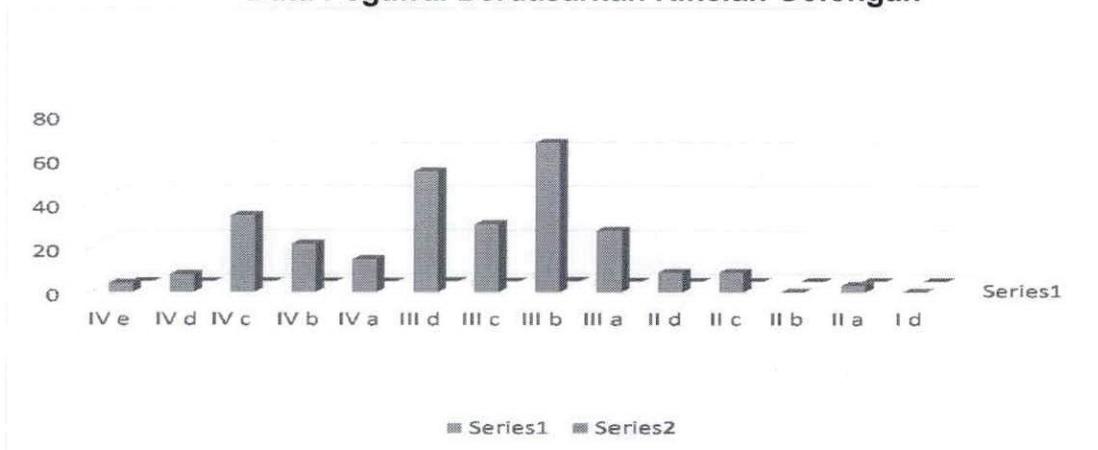
Berdasarkan golongan dan ruang, pegawai Inspektorat Jenderal terdiri dari 84 orang (29%) golongan IV, 182 orang (63%) golongan III, 21 orang (7%) golongan II, dan 0 orang (0%) golongan I.

Secara lebih rinci komposisi golongan dan ruang dipaparkan sebagai berikut : 4 orang (1%) golongan IV e, 8 orang (3%) golongan IV/d, 35 orang (12%) golongan IV/c, 22 orang (8%) golongan IV/b, 15 orang (5%) golongan IV/a, 55 orang (19%) golongan III/d, 31 orang (11%) golongan III/c, 68 orang (24%) golongan III/b, 28 orang (10%) golongan III/a, 9 orang (3%) golongan II/d, 9 orang (3%) golongan II/c, 0 orang (0%) golongan II/b, 3 orang (1%) golongan II/a, dan tidak terdapat pegawai dengan golongan I.

Gambar 7.
Data Pegawai Berdasarkan Golongan



Gambar 8.
Data Pegawai Berdasarkan Rincian Golongan



BAB III KERAGAAN ANGGARAN

A. PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN

1. Alokasi Anggaran Tahun 2017

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan 4 Sukses Pembangunan Pertanian yakni (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada berkelanjutan, (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan, (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor serta (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diberikan amanah untuk melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan total anggaran yang dikelola sebesar Rp92.439.375.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Belanja Tahun 2017

Kode/ Program/ Kegiatan/ MAK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/MAK/ URAIAN PENGELUARAN	PAGU	(%)
1	2	3	4
018.02.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN	92.439.375.000	100,00
51	Belanja Pegawai	22.527.000.000	24,37
52	Belanja Barang	67.902.011.000	73,46
53	Belanja Modal	2.010.364.000	2,17

Sumber Data: RKAKL Tahun 2017

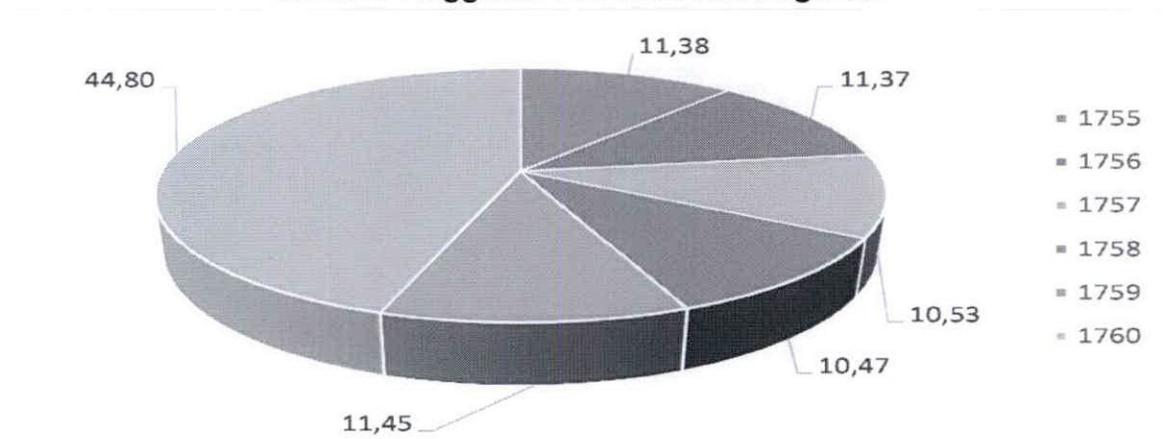
Tabel 2.

Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2017

No.	Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)	Proporsi (%)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN			92.439.375.000	100,00
1	1755	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan BPPSDMP	10.515.100.000	11,38
2	1756	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	10.512.300.000	11,37
3	1757	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP	9.735.600.000	10,53
4	1758	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	9.675.800.000	10,47
5	1759	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada satker lingkup Kementerian Pertanian	10.584.800.000	11,45
6	1760	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	41.415.775.000	44,80

Sumber Data: RKAKL Tahun 2017

Gambar 9.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan



Proporsi anggaran terbesar pada kegiatan 1760 (Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal) yang dikelola Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dengan proporsi sebesar 44,80% dari total anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Jumlah anggaran tersebut sebagian besar adalah untuk layanan perkantoran (terutama gaji dan tunjangan) sebesar 64,23%.

Tabel 3.
Alokasi Anggaran berdasarkan Output Inspektorat & Sekretariat Tahun 2017

Kode/ Program/ Kegiatan/ Output	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT URAIAN PENGELUARAN	VOLUME KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4
018.02.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN		92.439.375.000
1755	PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA SATKER LINGKUP SETJEN, DITJEN HORTIKULTURA, DAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN		10.515.100.000
1755.010	REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA PADA SATKER LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA, DAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	170 REK.	4.611.036.000
1755.011	REKOMENDASI PENGAWALAN LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA, DAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	7 REK.	1.438.572.000
1755.012	REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL, DITJEN HORTIKULTURA, DAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN SERTA SAKIP KEMENTERIAN	14 REK.	541.952.000
1755.013	REKOMENDASI HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA, DAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN SERTA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN	5 REK.	742.114.000
1755.965	LAYANAN AUDIT INTERNAL	1 Layanan	3.181.426.000
1756	PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA SATKER LINGKUP DITJEN TANAMAN PANGAN, DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN		10.512.300.000
1756.010	REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA PADA SATKER LINGKUP DITJEN TANAMAN PANGAN DAN DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	126 REK.	4.623.652.000
1756.011	REKOMENDASI HASIL PENGAWALAN PADA SATKER LINGKUP DITJEN TANAMAN PANGAN DAN DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	88 REK.	1.438.572.000
1756.012	REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP LINGKUP DITJEN TANAMAN PANGAN DAN DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	2 REK.	415.832.000
1756.013	REKOMENDASI HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN LINGKUP DITJEN TANAMAN PANGAN DAN DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	12 REK.	457.752.000
1756.965	LAYANAN AUDIT INTERNAL	1 Layanan	3.576.492.000
1757	PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA SATKER LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN, BADAN LITBANG PERTANIAN DAN BADAN KETAHANAN PANGAN		9.735.600.000
1757.010	REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA PADA SATKER LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN, BADAN LITBANG PERTANIAN DAN BADAN KETAHANAN PANGAN	178 REK.	4.631.076.000
1757.011	REKOMENDASI HASIL PENGAWALAN LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN, BADAN LITBANG PERTANIAN DAN BADAN KETAHANAN PANGAN	50 REK.	1.438.572.000
1757.012	REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN, BADAN LITBANG PERTANIAN DAN BADAN KETAHANAN PANGAN	3 REK.	427.472.000
1757.013	REKOMENDASI HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN, BADAN LITBANG PERTANIAN DAN BADAN KETAHANAN PANGAN	18 REK.	447.094.000
1757.965	LAYANAN AUDIT INTERNAL	1 Layanan	2.791.386.000
1758	PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA SATKER LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, BADAN KARANTINA PERTANIAN		9.675.800.000
1758.010	REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA PADA SATKER LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, BADAN KARANTINA PERTANIAN	150 REK.	4.616.076.000
1758.011	REKOMENDASI HASIL PENGAWALAN LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, BADAN KARANTINA PERTANIAN	36 REK.	1.438.572.000
1758.012	REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, BADAN KARANTINA PERTANIAN	5 REK.	412.472.000
1758.013	REKOMENDASI HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, BADAN KARANTINA PERTANIAN	10 REK.	432.094.000
1758.965	PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA LINGKUP INSPEKTORAT IV	1 Layanan	2.776.586.000
1759	PENINGKATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN TUJUAN TERTENTU PADA SATKER LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN		10.584.800.000
1759.965	LAYANAN AUDIT INTERNAL	1 Layanan	10.584.800.000
1760	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA PADA INSPEKTORAT JENDERAL		41.415.775.000
1760.950	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I	1 Layanan	13.402.411.000
1760.951	LAYANAN INTERNAL (OVER HEAD)	1 Layanan	2.010.364.000
1760.994	LAYANAN PERKANTORAN	12 Bulan	26.003.000.000

Sumber Data: RKAKL Tahun 2017

Dari tabel diatas kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi kegiatan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan dan pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya lingkup Inspektorat I, II, III, IV. Dari semua kegiatan tersebut yang paling menonjol pada kegiatan Audit Kinerja dengan total anggaran sebesar Rp18.481.840.000,00, dengan volume kegiatan 624 rekomendasi. Untuk Inspektorat Investigasi melaksanakan kegiatan Audit Tujuan Tertentu serta upaya pencegahan korupsi.

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Layanan Internal (Overhead) dan Layanan Perkantoran. Dari ketiga kegiatan tersebut, anggaran yang paling besar ada pada kegiatan Layanan Perkantoran sebesar Rp26.003.000.000,00.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Sampai dengan 31 Desember 2017 realisasi anggaran sebesar Rp85.722.719.223,00 atau 92,73% dari total anggaran sebesar Rp92.439.375.000,00. Berikut rincian perkembangan realisasi anggaran bulanan sebagaimana tabel berikut:

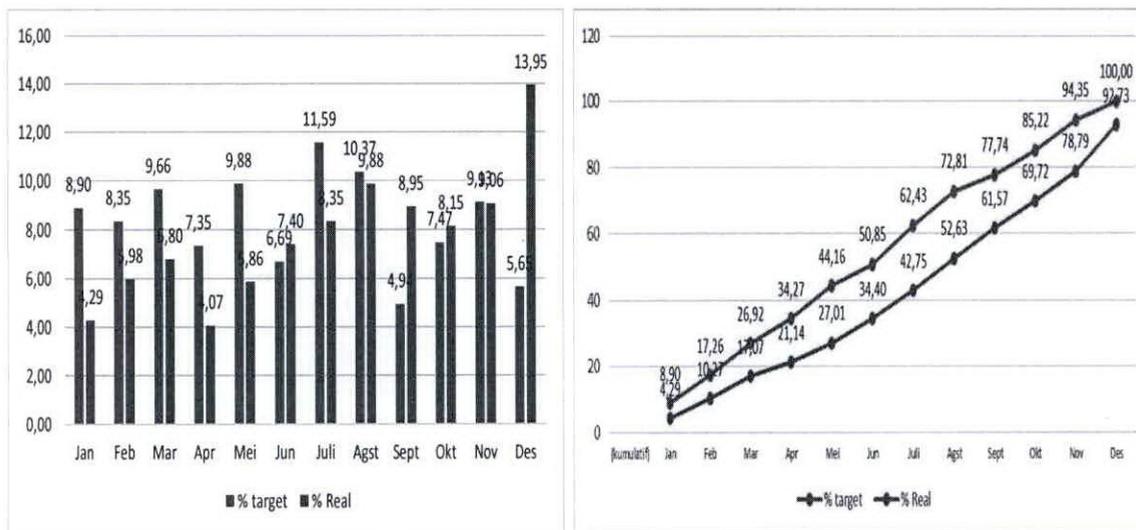
Tabel 4. Realisasi Bulanan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017

Bulan	Target		Realisasi		Target Kumulatif		Realisasi Kumulatif	
	per Bulan		per Bulan		per Bulan		per Bulan	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
JAN	8.231.396.083	8,90	3.962.348.189	4,29	8.231.396.083	8,90	3.962.348.189	4,29
FEB	7.722.542.750	8,35	5.531.484.669	5,98	15.953.938.833	17,26	9.493.832.858	10,27
MARET	8.932.384.083	9,66	6.288.059.021	6,80	24.886.322.916	26,92	15.781.891.879	17,07
APRIL	6.795.510.083	7,35	3.761.330.512	4,07	31.681.832.999	34,27	19.543.222.391	21,14
MEI	9.137.470.750	9,88	5.420.849.147	5,86	40.819.303.749	44,16	24.964.071.538	27,01
JUN	6.184.531.583	6,69	6.839.644.319	7,40	47.003.835.332	50,85	31.803.715.857	34,40
JULI	10.709.716.250	11,59	7.716.934.176	8,35	57.713.551.582	62,43	39.520.650.033	42,75
AGUS	9.587.930.750	10,37	9.129.000.293	9,88	67.301.482.332	72,81	48.649.650.326	52,63
SEPT	4.565.279.083	4,94	8.269.095.900	8,95	71.866.761.415	77,74	56.918.746.226	61,57
OKT	6.909.102.250	7,47	7.533.798.976	8,15	78.775.863.665	85,22	64.452.545.202	69,72
NOP	8.437.327.750	9,13	8.379.425.445	9,06	87.213.191.415	94,35	72.831.970.647	78,79
DES	5.226.183.585	5,65	12.890.748.576	13,95	92.439.375.000	100,00	85.722.719.223	92,73

*Realisasi bulan desember didasarkan atas dokumen per SP2D

Gambar 10.

Perkembangan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 Per Bulan dan Kumulatif



Berdasarkan gambar 10 (sebelah kiri), terlihat bahwa realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus 2017 cenderung lebih rendah dibanding target pada bulan bersangkutan. Hal tersebut mengindikasikan kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana. Realisasi anggaran lebih tinggi dibanding target mulai terlihat mulai bulan September 2017 dan mencapai puncaknya pada bulan Desember 2017, dimana prosentasi realisasi anggaran sebesar 246,66%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penumpukan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Risiko yang menyertai kondisi tersebut adalah kurang tertibnya administrasi kegiatan, sehingga dilakukan pengendalian yang lebih intensif.

Berdasarkan gambar 10 (sebelah kanan), terlihat bahwa realisasi anggaran secara kumulatif terdapat simpangan atau bias antara target dan realisasi kumulatif, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dibawah target.

Pagu anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2017 sebesar Rp92.439.375.000,00 seluruhnya berasal dari rupiah murni. Adapun rincian realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

3. Monitoring Penerbitan Laporan

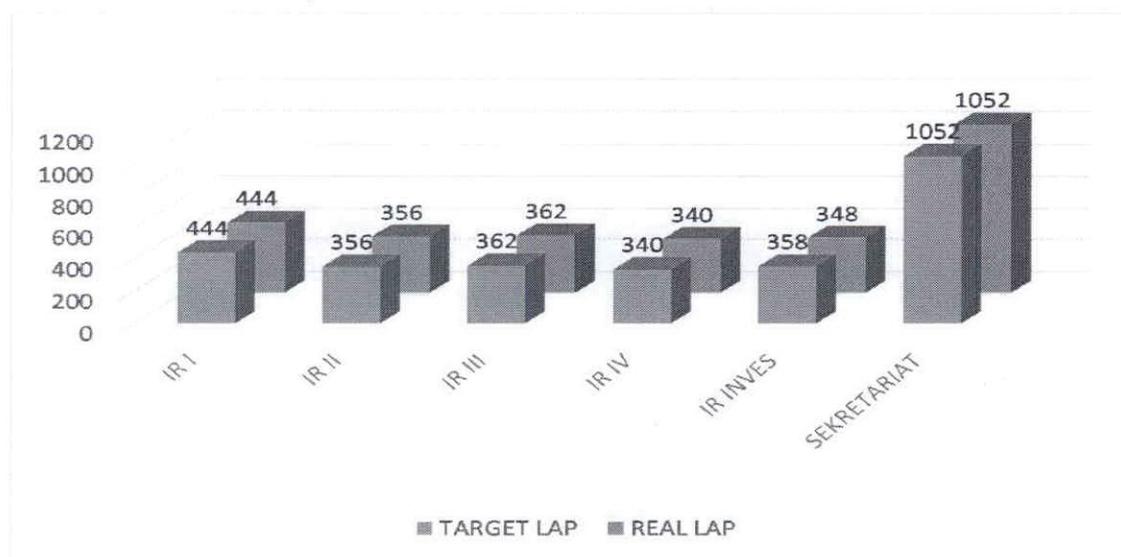
Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atau tim telah selesai melaksanakan tugasnya. Posisi perkembangan penerbitan laporan sampai dengan 31 Desember 2017 yang dipantau melalui aplikasi Access:

Tabel 6.
Monitoring Penerbitan Laporan Perjalanan Dinas Tahun 2017

ESELON II	Jumlah PP	Target Laporan	LAPORAN TERBIT				LAPORAN BELUM TERBIT			
			Laporan Terbit	%	Tepat Waktu	Terlambat	Belum Terbit	%	Masuk Masa KK	Terlambat
Inspektorat I	444	444	444	100,00	72	372	0	0,00	0	0
Inspektorat II	356	356	356	100,00	78	278	0	0,00	0	0
Inspektorat III	362	362	362	100,00	164	198	0	0,00	0	0
Inspektorat IV	340	340	340	100,00	83	257	0	0,00	0	0
Inspektorat Investigasi	358	358	348	97,21	75	273	10	2,79	0	10
Sekretariat	1052	1052	1052	100,00	481	571	0	0,00	0	0
Total	2.912	2.912	2.902	99,66	953	1.949	10	0,34	0	10

Sumber Data: Aplikasi Access Tahun 2017 (posisi 31 Des 2017)

Gambar 11.
Monitoring Penerbitan Laporan Perjalanan Dinas



Sampai dengan 31 Desember 2017 laporan yang belum terbit antara lain Inspektorat Investigasi masih terdapat 10 (sepuluh) laporan, sedangkan untuk Inspektorat I, II, III, IV dan Sekretariat semua laporan perjalanan dinas telah selesai.

Tabel 7.
Monitoring Laporan Perjalanan Dinas Yang Belum Terbit
Inspektorat Investigasi Tahun 2017

NO	LAPORAN YANG BELUM TERBIT	PROVINSI
1	Kegiatan Pengaduan masyarakat terkait penyaluran pupuk bersubsidi pada Ditjen PSP	Pusat
2	Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai pada Satker Dinas Pertanian Kab. Balangan	Prov. Kalsel
3	Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai pada Satker Dinas Pertanian Kab. Kota Baru	Prov. Kalsel
4	Kegiatan Penyaluran dan Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Rokan Hulu dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Siak Provinsi Riau	Prov. Riau
5	Kegiatan Penyaluran dan Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal dan Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Demak	Prov. Jateng
6	Kegiatan Penyaluran dan Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi pada Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai dan Dinas Pertanian Kab. Deli Serdang	Prov. Sumut
7	Kegiatan lanjutan pengaduan masyarakat terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada Satker Ditjen PSP di Dinas Pertanian Tan.Pangan, Disbun serta Dinas TPH dan Perkebunan Kab. Bogor	Prov. Jabar
8	Pengambilan contoh pupuk Subsidi terkait Audit Tujuan Tertentu Penyaluran dan Pemanfaatan Bersubsidi tahun 2017 di Kab. Kendal dan Kab. Demak	Prov. Jateng
9	Kegiatan lanjutan Penyaluran & Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kendal dan Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Demak	Prov. Jateng
10	Penyaluran dan Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi Tahun 2017	Prov. Sumut

B. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2017 dengan realisasi anggaran sebesar Rp85.722.719.223,00 atau 92,73%.

Beberapa capaian kinerja dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Audit Kinerja; 2) Audit Pengadaan Barang Jasa (PBJ); 3) Audit Barang Milik Negara (BMN); 4) Audit Investigasi; 5) Audit Tujuan Tertentu; 6) Kegiatan Pengawasan Lainnya; 7) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 8) Evaluasi Program; 9) Reviu Laporan Keuangan dan pendampingan; 10) Reviu Rencana dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL); 11) Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern kegiatan; 12) Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 13) Workshop/Seminar/Forum/ Penyelenggaraan SPIP 14) Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Tahunan Pelaksanaan Anggaran. Secara rinci capaian Inspektorat Jenderal terdeskripsi pada lampiran 1.

BAB IV KERAGAAN KEGIATAN

Sejalan dengan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, setiap kementerian/lembaga harus merestrukturisasi program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan *performance based budgeting* sehingga setiap unit kerja harus memiliki indikator kinerja, merencanakan program/kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi capaian indikator kinerjanya sendiri. Secara umum strategi pengawasan Itjen Kementan diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan pertanian, meningkatkan penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Hal ini di arahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas dan keekonomisan dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian dengan mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pemberian rekomendasi strategis. Secara internal, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terus menerus meningkatkan kapabilitasnya melalui peningkatan kapasitas, kompetensi SDM dan kewenangan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan non pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal diyakini telah menerapkan prinsip-prinsip pemeriksaan dalam menghasilkan rekomendasi strategis dimaksud sebagai wujud berfungsinya pengawasan.

A. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.2459/Kpts/PW.170/H/12/2015 tentang Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, maka Kebijakan operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada 8 (delapan) kegiatan strategis dalam rangka mendukung swasembada (padi, jagung, kedelai, daging, gula, bawang merah, cabai dan kakao) melalui peningkatan pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur Negara. Adapun kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 2.

Berikut adalah hasil pencapaian kinerja, dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal:

1. Audit Berbasis Resiko

a. Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan sebagai pengembangan dari audit keuangan. Audit kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu Kementerian/Lembaga Pemerintah dan untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran dari kegiatan yang menggunakan anggaran. Oleh karena audit kinerja (*performance* audit) merupakan perluasan dari audit keuangan yang meliputi: ekonomis, efisien dan efektifitas. Dengan memperhatikan hal tersebut maka auditor yang akan melaksanakan kegiatan harus memperoleh informasi tentang organisasi, meliputi struktur organisasi, prosedur kerja, sistem informasi, pelaporan keuangan dan kegiatan.

Tabel 8.
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT Tahun 2017

Kegiatan Pengawasan	Jumlah Rekomendasi/Lap		Jumlah Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
AUDIT:				
1. Audit Kinerja	624	716	18.481.840.000	17.952.613.395
2. Audit Tujuan Tertentu	88	106	4.859.846.000	4.723.486.816
3. Audit Investigasi	16	5	115.828.000	67.745.284
REVIU:				
1. Reviu Laporan Keuangan	45	56	2.079.054.000	1.899.245.431
2. Reviu RKAKL	17	19	509.149.000	385.342.120
Evaluasi SAKIP	24	27	1.797.728.000	1.589.532.300
Pengawasan/Pendampingan	181	213	5.754.288.000	5.498.263.717
Maturitas SPIP:				
1. Penilaian SPIP	120	139	511.236.000	499.747.098
2. Pembinaan SPIP	104	133	207.588.000	170.861.000
3. Forum SPIP	1	1	916.650.000	861.350.800
ZI WBK/WBBM	77	1	3.723.631.000	3.307.128.400
1. Pembinaan	2	3	2.803.784.000	2.622.763.483
2. Penilaian	75	78	713.735.000	713.634.917

Berdasarkan data pada Tabel 8 diatas, terlihat bahwa Itjen Kementan telah menggunakan anggaran untuk audit kinerja senilai Rp17.952.613.395,00 atau 97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp18.481.840.000,00, sedangkan target rekomendasi sebanyak 624 rekomendasi tertera di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2017, tercapai sebanyak 716 rekomendasi (115%).

b. Audit Investigasi

Audit Investigasi didasarkan pada instruksi pimpinan, surat pengaduan dari masyarakat dan atau pengembangan lebih lanjut atas hasil pemeriksaan kinerja. Audit Investigasi dengan obyek aparatur pengelola sumberdaya pada kantor pusat dan satuan kerja lingkup Kementan di daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sedangkan yang menyangkut aparatur daerah akan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi.

Tujuan pemeriksaan khusus/investigasi adalah untuk memperoleh kejelasan atau kebenaran suatu informasi indikasi adanya tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada tahun 2017, keragaan pelaksanaan Audit Investigasi sebagai berikut:

Tabel 9.
Keragaan Tema Pengaduan Audit Investigasi dan
Audit Tujuan Tertentu Tahun 2017

Kegiatan Pengawasan	Jumlah Rekomendasi		Jumlah Anggaran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Audit Investigasi	16	5	115.828.000	67.745.284
2. Audit Tujuan Tertentu	88	106	4.859.846.000	4.723.486.816
Jumlah	104	111	4.975.674.000	4.791.232.100

Sumber Data: Inspektorat Investigasi

Berdasarkan Tabel 9 di atas dapat dikemukakan bahwa, capaian kinerja kegiatan audit investigatif tahun 2017 sebanyak 5 rekomendasi atau 31,25% dari target yang ditetapkan sebanyak 16 rekomendasi. Tidak tercapainya target rekomendasi karena sampai dengan akhir Desember 2017 hanya ada 2 pengaduan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan audit investigasi

dan telah ditindaklanjuti pada bulan Oktober 2017. Data pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 61 pengaduan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 39 buah atau 63,93%. Sisanya sebanyak 22 buah atau 36,07% tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pengawasan (tidak berkadar pengawasan). Dari jumlah pengaduan yang memenuhi unsur-unsur pengawasan sebanyak 39 pengaduan, ditindaklanjuti dengan Audit Investigasi sebanyak 2 pengaduan atau 5,12%.

Capaian kinerja keuangan sebesar Rp67.745.284,00 atau 58,49% dari target yang ditetapkan sebesar Rp115.828.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp48.082.716,00 (*per tanggal 31 Desember 2017*).

c. Audit Tujuan Tertentu

Berdasarkan Tabel 9 di atas dapat dikemukakan bahwa, capaian kinerja audit dengan tujuan tertentu tahun 2017 sebanyak 106 rekomendasi atau 120% dari target yang ditetapkan sebesar 88 rekomendasi. Capaian kinerja keuangan untuk kegiatan Audit Tujuan Tertentu sebesar Rp4.723.486.816,00 atau 97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.859.846.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp136.359.184,00 (*per tanggal 31 Desember 2017*).

Pada tahun 2017, keragaan pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu sebagai berikut:

Tabel 10.
Keragaan Tema Audit Tujuan Tertentu Tahun 2017

NO	TEMA	LOKASI
1	Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian	Prov. Sulbar
2	Kegiatan kontrak tunda bayar akibat self blocking pengadaan benih padi inbrida TA.2016 pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Prov. Sulsel (Kab. Pangkep, Bulukumba, Bone, Wajo)
3	Kegiatan Penyaluran dan Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi	Prov. Jabar, Jatim, Jateng, Sumut, Riau, Lampung)
4	Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai	Prov. Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, NTB

d. Audit BMN

Tahun 2017 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Audit Barang Milik Negara (BMN) dengan mengacu pada Peraturan MENPAN RB Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Tujuan Audit BMN adalah menertibkan penatausahaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan dukungan terhadap proses penghapusan BMN. Kriteria yang digunakan dalam audit BMN adalah PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PMK No.12 cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;0/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; Peraturan Barang Milik Negara Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Penggunaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Pelaksanaan Audit Barang Milik Negara (BMN) lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2017. Pada tahun 2017 kegiatan Audit BMN telah dilaksanakan oleh Inspektorat I, II, dan III sebagai berikut:

Tabel 11.
Keragaan Tema Audit Barang Milik Negara Tahun 2017

NO	TEMA	LOKASI	BULAN
1	Kegiatan Audit BMN terhadap barang yang diserahkan kepada masyarakat (526) dan aset tetap dalam rangka mendukung WTP pada Dinas Pertanian	Prov. Aceh, Jambi, Lampung, Jatim, Bali, NTB, Kaltim	Januari 2017
2	Kegiatan Audit BMN lingkup Ditjen tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Prov. NTB, Lampung, Sumsel, Sumut, Aceh, Jateng, Sulteng, Sulut, Kalsel, Kalbar, NTT, Kalteng, Jabar, Gorontalo	Januari 2017
3	Kegiatan Audit BMN dalam rangka Hibah/Penghapusan Aset dan Penyelesaian Kerugian Negara Lingkup Ditjen Tanaman Pangan untuk mendukung Penyelesaian Tindak Lanjut BPK-RI di Kementan dan Berkoordinasi dengan BPTP sebagai	Prov. Sumsel, Kalsel, Jambi, Sumbar, Jabar, Jateng, Sulut, Sumut	Juli 2017
4	Kegiatan Audit BMN Kegiatan Taman Teknologi Pertanian pada Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian TA.2016	Prov. Sultra, Jambi, Sulsel, NTT, NTB, Jabar, Kalsel, Kalteng	Januari 2017 (Tahap I)
		Prov. Jabar, Aceh, Sumbar, Riau, Sumsel, Jateng, DIY, Bali, Kaltim	Februari 2017 (Tahap II)
5	Kegiatan Audit BMN dalam Rangka Hibah Direktorat Jenderal Perkebunan	Prov. Jatim (Kab. Situbondo, Bondowoso, Ngawi, Madiun, Kediri, Kota Kediri, Tulungagung, Malang, Blitar, Tuban, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo).	Februari 2017

2. Pengawasan/Pendampingan/Evaluasi Tahun 2017

Tujuan Pengawasan dan Evaluasi pada unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian adalah melakukan penilaian secara komprehensif terhadap Kegiatan Strategis Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; yakni pada kegiatan yang mempunyai skala nasional, bernilai strategis yang tinggi serta memerlukan anggaran yang cukup besar. Keragaan kegiatan tersebut terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 12.
Keragaan Kegiatan Pengawasan/Pendampingan dan Evaluasi
Tahun 2017

NO	KEGIATAN PENGAWALAN / PENDAMPINGAN DAN EVALUASI	IR	PROVINSI / KAB	BULAN
1	Pengawasan Kegiatan dana APBNP lingkup Ditjen Hortikultura TA.2017	IR I	Kab. Lombok Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab. Majalengka, Kab. Bandung, Kab. Magelang, Kab. Malang, Prov. Kalsel, Kab. Enrekang.	Sept 2017
	Pengawasan dana APBN-P Ditjen Hortikultura TA 2017		Kab. Bandung, Kab. Cirebon, Kab. Lampung Selatan, Kab. Temanggung, Malang, Prov. Kalsel, Kab. Lombok Timur, Kab. Nganjuk, Prov. Kaltim.	Okt 2017
	Pengawasan Rekrutmen CPNS Tahap Seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) Kemtan Tahun 2017		Sumsel, Papua, Sumut, Riau, Jakarta	Okt 2017
	Pengawasan Rekrutmen CPNS Tahap Seleksi Tes Kompetensi Bidang (TKB) Kemtan Tahun 2017		Jakarta, Sumut, DIY, Jatim, Sulsel, Papua	Nop 2017
2	Pembinaan SPIP Kegiatan Perluasan Areal Tanam Kedelai APBNP TA. 2017 Lingkup Ditjen TP	IR II	Sumbar, NTB, Aceh, Lampung, Jabar, Jateng, Kalsel, Sulsel, Sulut	Okt 2017
	Evaluasi Cetak Sawah TA 2015 dan 2016		Sumsel, Lampung, Kalteng, Kalbar, Sultra, Sulteng, NTT	Mar 2017
3	Pembinaan SPIP Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Melalui Pengadaan Benih Siap Salur Dana APBN-P TA.2017	IR III	Sulsel, Sultra, Lampung, Maluku, Jateng, Sumut, Jabar	Agts 2017
	Pembinaan SPIP Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Melalui Pengadaan Benih Siap Salur Dana APBN-P TA.2017		NTT, Jabar, Jateng, Jatim, Sumbar, NTB	Sept 2017
	Pembinaan SPIP Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan melalui Penyiapan Benih Dana APBN-P		Jabar, Jateng, Jatim, Sumbar, NTB	Sept 2017
	Kegiatan Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tebu APBNP TA.2017 Lingkup Ditjen Perkebunan		Jatim, Jateng, Sumsel, Lampung, Sulsel	Nop 2017
4	Pengawasan Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) - UPSUS SIWAB TA.2017	IR IV	Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Sulsel, Sumut	Mei 2017
	Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui APBNP TA.2017		Jabar, Bali, Jateng, DIY, Lampung, Kalsel	Agts 2017
	Pengawasan Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) - UPSUS SIWAB		Sumut, Sumbar, Lampung, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Sulteng, Sulsel, NTT, NTB	Des 2017

a. Pengawasan Kegiatan yang dananya bersumber dari APBN-P lingkup Ditjen Hortikultura TA 2017

Inspektorat I telah melaksanakan kegiatan Pengawasan Dana APBNP lingkup Ditjen Hortikultura yang meliputi Pengawasan kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah dan Jengkol.

Kegiatan Pengawasan Dana APBNP dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2017, meliputi Provinsi Kalsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Sulsel dan Kaltim.

Hasil kegiatan Pengawasan Dana APBNP sebagai berikut (1) Dari 5 unsur SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan), sampai dengan berakhirnya penugasan pengawasan baru dalam tahap proses penilaian resiko; (2) Teridentifikasi risiko yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan kawasan bawang merah yaitu risiko pengadaan benih bawang merah, resiko gerakan pengendalian hama penyakit, kegiatan pelatihan; (3) Pada unsur Informasi dan komunikasi dalam mendukung kegiatan pengembangan kawasan bawang merah belum dibentuk sarana komunikasi maupun manajemen sistem informasi sebagai sarana pengendalian kegiatan; (4) Belum melakukan pemantauan sehingga pengawasan terhadap pemantauan pengendalian intern belum dapat dilakukan.

b. Pengawasan Rekrutmen CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2017

Pengawasan Rekrutmen CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2017 dilaksanakan 3 (tiga) tahap meliputi:

Tabel 13.
Kegiatan Pengawasan CPNS Kementerian Pertanian Tahun 2017

TAHAP	MATERI	LOKASI	BULAN
I	Seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD)	Sumsel, Sumut; Papua; DKI Jakarta; Riau	Oktober 2017
II	Seleksi Tes Kompetensi Bidang (TKB)	Sumut, DKI Jakarta, DIY, Jatim, Sulsel, Papua	September 2017
III	Psikotes penerimaan CPNS lingkup Kementerian Pertanian	Depok	Nopember 2017

c. Pengawasan Pembinaan SPIP Kegiatan Perluasan Areal Tanam Kedelai APBNP TA.2017

Pengawasan Pembinaan SPIP Kegiatan Perluasan Areal Tanam Kedelai APBNP TA.2017 di dilaksanakan pada tanggal 10 sd 17 Oktober 2017 di Provinsi Lampung; Sumatera Barat; NTB; Aceh; Jawa Barat; Jawa Tengah; Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan; Sulawesi Utara.

Hasil kegiatan Pengawasan Pembinaan SPIP Kegiatan Perluasan Areal Tanam Kedelai APBNP sebagai berikut:

- 1) Unsur lingkungan pengendalian dapat berpengaruh terhadap risiko Kegiatan Perluasan Areal Tanam Kedelai APBNP tahun 2017 yaitu:
 - a. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan belum dibuat, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum menetapkan Tim Teknis di tingkat provinsi dan kabupaten.
 - b. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat belum terlaksana.
 - c. Penanggung jawab belum mengevaluasi sistem pelaporan dan informasi kegiatan.
 - d. Tim Teknis belum melaksanakan pengawasan terhadap pembuatan Rencana Usaha Kelompok (RUK) untuk mendukung kegiatan saprodi.
 - e) Masih terdapat Kepala Dinas yang belum menetapkan Surat Keputusan tentang Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) penerima bantuan APBN-P Kedelai tahun 2017.
- 2) Dari lima unsur SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan), sampai dengan berakhirnya penugasan, pembinaan telah mencapai proses Penilaian Resiko.
- 3) Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan belum didokumentasikan.

d. Evaluasi Cetak Sawah Tahun 2015 dan 2016

Dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kinerja dari upaya penambahan luas lahan sawah serta alih fungsi lahan pertanian, Inspektorat II telah melaksanakan Evaluasi Cetak Sawah tahun 2015 dan 2016 di 7 (tujuh) Provinsi yaitu Sumsel, Lampung, Kalteng, Kalbar, Sultra, Sulteng dan NTT.

Pada tahun 2015 dari total pagu anggaran kegiatan perluasan sawah di 4 provinsi lokasi evaluasi (Provinsi Sumsel, Lampung, Kalbar, dan Sultra) senilai Rp146.941.550.000,00 terealisasi senilai Rp138.301.393.800,00 atau 94,12%. Realisasi fisik tahun 2015 dari target seluas 7.550 ha terealisasi seluas 7.327 ha atau 97,05%.

Pada tahun 2016 dari total pagu anggaran kegiatan perluasan sawah di 7 provinsi lokasi evaluasi (Provinsi Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalteng, Sulteng, Sultra dan NTT) senilai Rp1.311.001.120.500,00 terealisasi senilai Rp1.250.365.405.946,00 atau 95,37%. Realisasi fisik tahun 2016 dari target seluas 66.674 ha terealisasi seluas 65.447 ha atau 98,16%.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan konstruksi cetak sawah dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Survey, Investigasi, dan Desain (SID) di tujuh provinsi dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu kontrak Survey dan Investigasi (SI) seluas 140.840 ha dan kontrak Pemetaan Desain seluas 110.600 ha. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat hasil SID tidak termanfaatkan karena merupakan lahan/areal HGU dan tumpang tindih dengan hutan lindung yaitu di Provinsi Sumatera Selatan seluas 60 ha, Lampung seluas 120 ha dan Kalimantan Tengah seluas 666 ha.
2. Pemanfaatan lahan yang tercetak di tujuh provinsi seluas 69.443,96 ha telah ditanami seluas 49.044,36 atau 70,62 %, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 14.
Kegiatan Perluasan Lahan Sawah Tahun 2016

PROVINSI	LUAS LAHAN SAWAH		
	TARGET (ha)	REALISASI (ha)	%
Sumsel	11.475,00	8.633,00	75,23
Lampung	11.875,00	8.481,00	71,42
Kalbar	16.905,00	13.061,05	77,26
Kalteng	16.550,00	11.571,00	69,92
Sulteng	4.962,00	3.590,00	72,35
Sultra	6.000,00	3.031,31	50,52
NTT	1.676,96	677,30	40,39
TOTAL	69.443,96	49.044,66	70,62

3. Pekerjaan pengelupasan lahan di Prov. Kalimantan Barat seluas 97 ha belum dikerjakan, pekerjaan perbaikan JUT seluas 8.448 m² di poktan Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak dilakukan pemadatan sehingga rusak, pekerjaan cetak sawah pada lahan pasang surut tidak berpedoman desain yaitu tidak dilengkapi dengan pembuatan pintu pembuang dan pemasuk air sehingga kondisi sawah selalu tergenang (Provinsi Lampung), lahan yang tercetak dengan luas 60 ha tidak memiliki sumber air sehingga diperlukan pompanisasi (NTT).
4. Alokasi anggaran bantuan saprodi di tujuh provinsi senilai Rp399.623.960.000,00 diantaranya sebanyak enam provinsi senilai Rp371.633.960.000,00 dilaksanakan melalui pengadaan secara kontraktual sedangkan satu provinsi senilai Rp27.990.000.000,00 dilaksanakan melalui transfer uang ke rekening poktan. Namun, di Provinsi Lampung transfer dana ke poktan untuk bantuan saprodi senilai Rp704.000.000,00 masih direkening poktan belum dimanfaatkan. Hal yang sama terjadi di poktan Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp750.000.000,00 belum dimanfaatkan.

e. Pengawasan Pembinaan SPIP Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan melalui Penyiapan Benih Dana APBN-P TA. 2017 pada Satker Lingkup Badan Litbang Pertanian

Pengawasan APBN-P Badan Litbang Pertanian melalui Pembinaan SPIP Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio Industri berkelanjutan dana APBN-P Tahun 2017 telah dilaksanakan di 4 provinsi pada 9 satker terdiri dari 6 Balai Penelitian (Balitsa Lembang, Balivet, Balitri Sukabumi, Balittas Malang, Balijestro Malang dan Balitbu Solok) dan 3 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP Jateng, BPTP Jatim, dan BPTP NTB). Pengawasan/Pendampingan SPIP meliputi kegiatan penyiapan benih yang dilaksanakan Satker terkait dengan pelaksanaan APBN-P 2017 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk memastikan satker telah membangun dan mengimplementasikan SPIP khususnya 1) Melakukan penilaian Risiko, 2) Membangun Kegiatan Pengendalian (Kebijakan/SOP) untuk menangani Risiko, 3) Mengukur Pelaksanaan (K/SOP) dan 4) Mengevaluasi atau Membuat Rencana Evaluasi Pelaksanaan (K/SOP).

Hasil Pendampingan SPIP pada Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio Industri Berkelanjutan melalui Penyiapan Benih Anggaran APBN-P TA 2017, sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi Lingkungan Pengendalian yang berpengaruh terhadap Penyiapan Benih yaitu: a) belum melakukan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat kepada pegawai sesuai tingkat tanggungjawabnya; b) satker belum melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian terkait mengenai penyaluran dan penetapan calon kelompok penerima; c) satker belum menetapkan tim teknis pelaksanaan kegiatan; d) panitia penerima hasil pekerjaan belum ditetapkan dengan SK KPA; e) data CP/CL belum tersedia untuk distribusi benih sebar yang siap salur.

2. Dari 5 unsur SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan) sampai dengan berakhirnya penugasan pengawalan, baru dalam proses penilaian risiko, yaitu sebagai berikut:
 - a) Perbanyak Benih siap salur
 - b) Pelaksanaan okulasi
 - c) Pemeliharaan tanaman
 - d) Sertifikasi Calon Benih
 - e) Pertanggungjawaban keuangan
3. Identifikasi Risiko dan Analisa Risiko serta 3 unsur SPIP (Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan) masih dalam proses atau belum dilaksanakan.

f. Pengawalan Pembinaan SPIP Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Melalui Pengadaan Benih Siap Salur Dana APBN-P TA. 2017 pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan

Pengawalan Pembinaan SPIP Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Melalui Pengadaan Benih Siap Salur Dana APBN-P TA. 2017 telah dilaksanakan selama 8 hari di 8 Provinsi yaitu Sultra, Sumut, NTT, Sulsel, Maluku Utara, Lampung, Jateng, Jabar.

Hasil kegiatan Pengawalan Pembinaan SPIP Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Melalui Pengadaan Benih Siap Salur Dana APBN-P TA. 2017 antara lain:

- 1) Terdapat unsur lingkungan pengendalian yang berpengaruh terhadap risiko kegiatan antara lain belum ditetapkan standar operasional prosedur (SOP), rencana kegiatan, operasional anggaran, kompetensi Tim Teknis; belum ditetapkan Tim Pokja Pengadaan; Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, penetapan kelompok tani serta penetapan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) masih dalam proses perbaikan rincian harga.

- 2) Dari 5 unsur SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan) sampai dengan berakhirnya penugasan pengawalan baru dalam proses penilaian risiko.
- 3) Identifikasi risiko dan analisa risiko serta 3 unsur SPIP berikutnya yaitu kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan masih dalam proses atau belum dilaksanakan.

g. Pengawalan Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tebu APBNP TA.2017 Lingkup Ditjen Perkebunan

Pengawalan Pembangunan Kebun Benih Datar Tebu APBNP TA.2017 telah dilaksanakan di 5 Provinsi yaitu Jateng, Jatim, Lampung, Sulsel, Sumsel, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Realisasi anggaran sampai dengan akhir Desember 2017 sebesar Rp4.819.137.950,00 atau 13,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp35.281.039.000,00, dengan realisasi fisik seluas 112 ha atau 12,92% dari sasaran yang ditetapkan seluas 867 ha. Hal ini disebabkan kegiatan pembangunan KBD Tebu hanya terlaksana di Provinsi Sulsel dan Jateng dengan realisasi sebagian kecil, sedangkan Jatim, Lampung dan Sumsel sama sekali tidak ada realisasi.
- 2) Sebagian besar pengelola kegiatan di lapangan yaitu 73,33% tidak setuju dengan alokasi kegiatan pembangunan KBD Tebu melalui APBNP, dengan alasan keterbatasan waktu karena calon bibit tebu yang ditanam harus dipersiapkan 6 sampai 8 bulan sesuai dengan umur tanam bibit dan tanaman tebu kebun benih induk (KBI).
- 3) Dinas Provinsi sebagian belum membuat Petunjuk Pelaksanaan/Teknis (Juklak/Juknis), dengan alasan pedoman dari pusat mengalami beberapa kali perubahan khususnya terkait dengan pola kerjasama pembangunan KBD tebu yang sebelumnya dengan swakelola yang dilakukan antara PPK dengan PG/PTP.
- 4) Penyelenggara pembangunan KBD tebu di daerah meragukan dapat melaksanakan pembangunan KBD tebu sampai akhir Desember 2017

dikarenakan tim teknis di provinsi sebagian belum ditetapkan, sedangkan calon lokasi kegiatan telah dipersipakn lengkap dengan SK Kepala Dinas Provinsi.

- 5) Pengadaan benih tebu berkualitas diusulkan dispensasi dalam pengadaan benih termasuk pembangunan KBD tebu dengan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden melalui Pemilihan Langsung.
- 6) Aturan atas pelaksanaan kegiatan secara padat karya lingkup Kementerian Pertanian belum ada dan menimbulkan kebingungan pelaksanaan kegiatan di lapangan termasuk pembangunan KBD tebu.
- 7) Dengan potensi tidak terlaksananya pembangunan KBD tebu APBNP TA.2017 seluas 755 ha di 5 provinsi, maka benih tebu untuk memenuhi kegiatan Perluasan dan Bongkar Ratoon Pola I tahun 2018 seluas 4.530 ha tidak tersedia. Selain itu penyediaan benih KBI sebagai bahan tanam KBD pola I tahun 2018 yang ditargetkan seluas 1.633 ha, jug berpotensi akan mengalami hambatan terkait prosedur pengadaan dan ketersediaan benih KBI sebagai bahan tanam KBD.

h. Evaluasi Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Tahun 2017

Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) merupakan gerakan nasional sebagai kelanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya guna lebih mendorong pertumbuhan kelahiran sapi potong di Indonesia. Upaya khusus ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mencapai Program Swasembada Daging yang ditargetkan Presiden Joko Widodo pada Tahun 2026 dalam rangka mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak. Evaluasi kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dilaksanakan oleh tim Inspektorat Jenderal dengan melibatkan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH). Evaluasi dilaksanakan pada 11 provinsi sentra ternak sapi dalam mendukung tercapainya target produksi

daging tahun 2017, yaitu di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan hasil sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran untuk kegiatan UPSUS SIWAB sampai dengan 30 November 2017 senilai Rp194.681.619.733,00 terdiri dari kegiatan Inseminasi Buatan (IB) senilai Rp99.200.024.968,00, kegiatan penanganan gangrep senilai Rp42.754.633.944,00, kegiatan penyediaan pakan senilai Rp48.094.190.655,00 dan pengendalian pemotongan betina produktif senilai Rp4.632.770.166,00.
2. Pengawasan pengembangan SPIP UPSUS SIWAB pada lima provinsi memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian outcome namun tidak signifikan mengingat implementasi rancangan penanganan resiko yang dirumuskan saat pengawasan SPIP belum diterapkan oleh satker secara maksimal.
3. Capaian output pada masing-masing tahapan pelaksanaan kegiatan, yaitu: Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) terealisasi 88,75%, hal tersebut disebabkan belum semua data realisasi IB dari masing-masing provinsi dilaporkan ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (SIKHNAS). Kegiatan penanganan gangguan reproduksi terealisasi 95,25% dengan tingkat kesembuhan 68,31%, hal ini melebihi target kesembuhan yaitu 60%. Kegiatan penyediaan pakan HPT terealisasi 92,71% dan pengadaan konsentrat di delapan provinsi terealisasi 100,00 %.
4. Kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif yaitu telah dilakukan penolakan betina produktif/bunting yang akan dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) sebanyak 7.732 ekor. Namun, belum dapat dipastikan ternak yang ditolak tersebut tidak dipotong karena pemotongan bisa dilakukan di Tempat Pemotongan Hewan (TPH). Selain itu, jumlah pemotongan betina produktif yang dilaporkan tahun 2017 sebanyak 13.460 ekor sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 25.586 ekor sehingga mengalami penurunan 12.126 ekor atau 47,39%.

5. Capaian kebuntingan sampai dengan 30 November 2017 sebesar 1.015.739 ekor atau 42,35% dari target 2.398.353 ekor. Belum tercapainya target PKB tersebut disebabkan alokasi anggaran untuk PKB belum mencakup seluruh akseptor yang di IB, terlambatnya Revisi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan UPSUS SIWAB tentang pembayaran operasional PKB tidak hanya pada sapi bunting, alokasi PKB untuk pelaksanaan IB bulan Oktober sampai dengan Desember 2017 baru akan dianggarkan Tahun 2018, adanya penolakan peternak untuk memeriksakan kebuntingan dan kurangnya jumlah petugas PKB.
6. Hasil pengukuran tingkat efisiensi menggunakan formula input dibagi output yaitu efisiensi pada pola pengusahaan intensif Rp850.717,00/ekor; semi intensif Rp404.354,00/ekor; dan ekstensif Rp626.376,00/ekor. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang unik antara efisiensi dengan pola pengusahaan. Tingginya biaya untuk menghasilkan sapi bunting pada daerah dengan pola pengusahaan intensif, disebabkan jumlah PKB terhadap sapi yang sudah di IB dan/atau belum dilaporkan. Sedangkan untuk daerah ekstensif, kesulitan melakukan PKB pada sapi yang digembalakan serta adanya tambahan biaya untuk pelaksanaan sinkronisasi birahi.

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2017

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi : (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Kinerja, dan (5) Capaian Kinerja; ditujukan untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan memberikan saran perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Hasil Evaluasi AKIP Eselon I Kementerian Pertanian disajikan pada tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15.
Keragaan Hasil Evaluasi AKIP Eselon I Tahun 2017

NO	ESELON I	NILAI	KATEGORI
1	SEKRETARIAT JENDERAL	76,34	BB (Sangat Baik)
2	INSPEKTORAT JENDERAL	82,87	A (Memuaskan)
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	80,43	A (Memuaskan)
4	DITJEN HORTIKULTURA	80,35	A (Memuaskan)
5	DITJEN PERKEBUNAN	79,49	BB (Sangat Baik)
6	DITJEN PETERNAKAN & KESWAN	72,60	BB (Sangat Baik)
7	DITJEN PRASARANA & SARANA PERTANIAN	80,34	A (Memuaskan)
8	BALITBANG	82,24	A (Memuaskan)
9	BPSDMP	77,41	BB (Sangat Baik)
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	89,87	A (Memuaskan)
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN	80,81	A (Memuaskan)
RATA-RATA		80,25	Memuaskan

Nilai rata-rata hasil evaluasi AKIP Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016 adalah sebesar 80,25 dengan kategori Memuaskan. Kementerian Pertanian pada tahun 2017 mendapat peningkatan penilaian dari menteri PAN dan RB berpredikat Memuaskan atau kategori “A” jika dibandingkan tahun 2016 mendapat predikat **Sangat Baik** atau kategori “BB”.

Tiga peringkat terbaik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan penilaian kategori sangat baik diraih Eselon I yaitu 1) Badan Ketahanan Pangan dengan nilai 89,87; 2) Inspektorat Jenderal dengan nilai 82,87; dan 3) Badan Litbang Pertanian dengan nilai 82,24.

4. Workshop SAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Kebijakan Pemerintah mengembangkan akuntabilitas instansi pemerintah melalui berfungsinya pelaksanaan Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian akuntabilitas.

Sebagai implementasi atas kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal maka pada tanggal 7 s.d 9 September 2017 dilaksanakan Workshop SAKIP Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2017, yang bertempat di Hotel Inside Yogyakarta. Tema workshop adalah “Dalam Rangka Pelaksanaan Misi Menuju “Nilai A” Akuntabilitas pada Program dan Pelayanan Pertanian sebagai Modalitas Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045. Peserta Workshop ditargetkan 80 orang dan realisasinya sebanyak 83 orang, terdiri dari auditor dan pengelola SAKIP lingkup Kementerian Pertanian. Materi Workshop adalah hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pertanian dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian tahun 2016, dan rencana aksi peningkatan nilai SAKIP Eselon I dan SAKIP Kementerian Pertanian tahun 2017.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Workshop SAKIP diharapkan memberi manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pimpinan dan seluruh pegawai di lingkup Kementerian Pertanian yang menangani SAKIP/LAKIN, guna melakukan perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mendukung upaya peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Workshop tersebut menghasilkan 6 (enam) rencana aksi yang ditandatangani oleh pejabat tertinggi yang membidangi perencanaan dan evaluasi serta pelaporan, meliputi (a) Revisi Renstra Kementerian; (b) Revisi Renstra Eselon I; (c) Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang sampai dengan tingkat Eselon IV; (d) Memformalkan indikator kinerja utama Kementerian Pertanian tahun 2015-2019; (e) Menyusun LAKIN Eselon I; (f) Meningkatkan kapasitas SDM bidang Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja.

5. Pelaksanaan Evaluasi Atase Pertanian (ATANI) 2017

Salah satu amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2015 adalah melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkup Kementerian Pertanian. Atase Pertanian mempunyai tugas melakukan kerjasama luar negeri di bidang pertanian yang meliputi bidang teknologi pertanian, sosial ekonomi pertanian, agribisnis, dan informasi-informasi lain yang menyangkut pembangunan pertanian dengan negara dan lembaga internasional/regional yang berkedudukan yang menjadi wilayah observasinya. Tahun 2017 Inspektorat melaksanakan kegiatan evaluasi atase pertanian di Washington DC.

Permasalahan yang dihadapi yaitu (1) Realisasi anggaran TA.2016 sebesar Rp1.217.909.561,00 atau 93,69% dari alokasi sebesar Rp1.300.000.000,00 sedangkan realisasi anggaran tahun 2017 sampai dengan saat evaluasi tanggal 5 November 2017 realisasi anggaran sebesar 63% dari alokasi sebesar Rp1.505.400.000,00. Realisasi fisik kegiatan TA.2016 sebesar 93,69% dan realisasi fisik kegiatan TA.2017 sampai saat evaluasi sebesar 63%; (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Atase Pertanian (Attani) belum seluruhnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan belum sepenuhnya didukung dengan SDM yang memadai; (3) Atase Pertanian Washington DC belum melakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara memadai; (4) Penyelenggaraan tugas dan fungsinya belum menerapkan manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja,

(5) Terdapat hambatan pencapaian output kegiatan antara lain cakupan area kerja di luar wilayah Amerika Serikat yang sangat luas sehingga mengandalkan keberadaan KBRI cq Fungsi Ekonomi yaitu Kanada (daging sapi), Meksiko (jagung, kapas), Guatemala (tebu), Brasil (kedelai), Argentina (kedelai), dan Karibia serta Negara-negara lainnya yang saat ini belum banyak tergali potensi kerjasamanya; (6) Kerjasama bilateral di bidang pertanian antara RI dengan AS dan Negara Observasi belum berjalan masih sebatas MOU yaitu Kerjasama RI-AS masih dalam bentuk draf MOU, Kerjasama RI dengan Meksiko, Kerjasama RI dengan Argentina dan Kerjasama RI dengan Kanada.

6. Reviu Laporan Keuangan

Reviu bertujuan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian serta pengakuan, pengukuran, pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas.

Metodologi reviu laporan keuangan kementerian keuangan dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan serta dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1). Reviu dititikberatkan pada akun laporan keuangan yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Tahun 2017 telah melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pertanian, meliputi :

- a. Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA/B (BA.018) Kementerian Pertanian Laporan Keuangan Semester II (Triwulan III) Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober s/d 3 November 2017 terdiri dari 11 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) dan 33 unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di lingkup Kementerian Pertanian dengan jumlah satker sebanyak 768 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

Berdasarkan hasil reviu atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017, dapat disampaikan catatan penting sebagai berikut:

- 1) Terdapat perbedaan jumlah satker inaktif bersaldo antara E-rekon dengan data dari Eselon I. yaitu berdasarkan E-Rekon sebanyak 409 satker sedangkan data dari Eselon I sebanyak 505 satker. Selain itu terdapat satker yang LKnya belum rekon sebanyak 378 satker.
- 2) Terdapat validasi jurnal tidak lazim pada 197 satker dari 10 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, sisi debet senilai Rp850.318.338.916.00 dan sisi kredit senilai Rp3.619.501.888.117.00.
- 3) Terdapat validasi saldo tidak normal pada 36 satker dari 7 Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian. sisi debet senilai Rp33.629.960.00.00 dan sisi kredit senilai Rp5.916.643.059.00.
- 4) Terdapat realisasi melebihi pagu pada beberapa akun belanja di 57 satker dari 11 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian senilai Rp108.170.915.522.00.
- 5) Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Realisasi Belanja pada beberapa akun belanja pada 4 satker dari 2 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian senilai minus Rp2.731.935.00.
- 6) Realisasi belanja pegawai senilai Rp1.608.327.115.187.00 sedangkan beban belanja pegawai senilai Rp1.609.051.729.356.00. sehingga terdapat selisih senilai Rp724.614.169.00.

- 7) Realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp84.558.342.199.00 sedangkan beban pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp84.556.992.119.00. sehingga terdapat selisih senilai Rp1.350.080.00.
 - 8) Realisasi belanja perjalanan dinas senilai Rp959.657.261.667.00 sedangkan beban perjalanan dinas senilai Rp959.680.949.667.00. sehingga terdapat selisih senilai Rp23.688.000.00.
 - 9) Terdapat akun Koreksi Nilai Persediaan pada Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp19.811.051.475.00 yang seharusnya dilakukan penyesuaian dalam Laporan Operasional (LO).
 - 10) Terdapat selisih saldo akun Persediaan. Tanah, Peralatan dan Mesin. Gedung dan Bangunan, jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Aset Lain-Lain dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya antara yang disajikan pada Neraca SAIBA dengan Neraca SIMAK BMN (LBPS) total senilai Rp11.956.517.708,00.
 - 11) Terdapat Persediaan untuk diserahkan kepada pemda/masyarakat yang berasal dari belanja 526 telah dikeluarkan dari neraca namun belum dilengkapi dengan BAST dari Eselon I ke Pemda senilai Rp1.636.380.140.986,00.
- b. Reviu Laporan Keuangan UAPA/B Kementerian Pertanian (BA.999.07 dan BA.999.08)
- Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA.999.07) dan Belanja Lain-Lain (BA.999.08) UAPPA Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2017 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca per tanggal 30 Juni 2017, berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 2 (dua) Eselon I selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) yang terdiri dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Sejak tahun 2014 Ditjen Tanaman Pangan tidak mendapatkan alokasi anggaran BA.999.08, namun masih memiliki kewajiban menyusun Laporan Keuangan BA.999.08 karena masih memiliki aset lancar.

Anggaran Belanja Subsidi (BA.999.07) yang dikelola pada Tahun 2017 senilai Rp32.444.969.400.000,00. Sedangkan Anggaran Belanja Lain-lain (BA.999.08) tidak tersedia.

Hasil revidi disampaikan sebagai berikut:

- 1) Terdapat kurang catat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada UAKPA/B Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (BA.999.07) senilai Rp89.159.094,00 berupa penerimaan kembali belanja subsidi pupuk tanaman tebu rakyat tahun 2011 dan tahun 2012.
- 2) Saldo akun Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2017 senilai Rp16.953.015.134,00 berupa Sisa luran Jasa Tirta II dan kelebihan pembayaran subsidi benih TA 2014 pada UAKPA/B Ditjen Tanaman Pangan (BA.999.07) dan senilai Rp4.811.607.957,00 berupa uang muka dana penyegaran pada UAKPA/B Ditjen Tanaman Pangan (BA.999.08) yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh PT Sang Hyang Sri (Persero).
- 3) Saldo akun Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2017 senilai Rp135.463.432,00 berupa saldo jasa giro di rekening PT Sang Hyang Sri (Persero) senilai Rp62.053.062,00 dan rekening PT Pertani (Persero) senilai Rp73.410.370,00 pada UAKPA/B Ditjen Tanaman Pangan (BA.999.08) yang belum disetorkan ke Kas Negara.
- 4) Saldo akun Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2017 senilai Rp266.333.586.108,00 pada UAKPA/B Ditjen Tanaman Pangan (BA.999.08), belum didukung dokumen sumber Surat Pengakuan Utang dari PT Pertani (Persero) senilai Rp37.542.203.788,00 dan PT Sang Hyang Sri (Persero) senilai Rp228.791.382.320,00.

5. Terdapat koreksi pencatatan dari persediaan ke selisih Cadangan Benih Nasional yang tidak ada di gudang maupun penangkar senilai Rp12.688.388.552,00 berupa jagung hibrida yang kadaluarsa. Namun koreksi tersebut tidak didukung.

7. Reviu RKAKL

Pelaksanaan Reviu Atas RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA.2017 dilaksanakan di Bekasi pada tanggal 1 s.d 3 November 2016. Total anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017 sebanyak Rp92.439.375.000,00 telah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. S-881/MK.02/2016 tentang Pagu Alokasi Anggaran K/L Tahun 2017 tanggal 17 Oktober 2016 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp22.527.000.000,00, Belanja Barang Operasional sebesar Rp3.476.000.000,00, Belanja Barang sebesar Rp67.901.011.000,00, dan Belanja Modal sebesar Rp2.010.364.000,00 yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM).

Dari hasil reviu oleh tim reviu Inspektorat Jenderal atas usulan RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA.2017, bahwa (a) pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-KL telah konsisten dengan Renja-KL; (b) total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-KL telah sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran K/L; (c) pada RKA-KL Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang outputnya telah di SBKkan, terdapat penggunaan Akun 521811 yang dipergunakan untuk pembelian ATK yang tidak dicatat dalam buku persediaan karena langsung habis digunakan untuk kegiatan antara lain pada kegiatan Audit Kinerja Satker Pusat Lingkup Ditjen Tanaman Pangan serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak 2 paket, Evaluasi terhadap AKIP Eselon I lingkup Kementerian Pertanian di Pusat dan Daerah sebanyak 2 paket, Reviu Laporan Keuangan Eselon I sebanyak 4 paket, Audit Kinerja satker daerah sebanyak 51 paket; terdapat alokasi anggaran untuk honor pengamanan kantor sebanyak 11 orang selama 12 bulan senilai Rp350.000,00/orang/bulan atau seluruhnya

senilai Rp46.200.000,00, seharusnya sebanyak 5 orang selama 12 bulan senilai Rp350.000,00 atau seluruhnya senilai Rp21.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan alokasi anggaran senilai Rp25.200.000,00; (d) terdapat alokasi anggaran untuk pengadaan pakaian satpam sebanyak 11 stel senilai Rp400.000,00/stel atau seluruhnya senilai Rp4.400.000,00 seharusnya sebanyak 5 stel senilai Rp400.000,00 atau seluruhnya senilai Rp2.000.000,00, sehingga terdapat kelebihan alokasi anggaran senilai Rp2.400.000,00; terdapat alokasi anggaran untuk pengadaan pakaian montir sebanyak 2 stel senilai Rp175.000,00/stel atau seluruhnya senilai Rp350.000,00 seharusnya tidak dialokasikan karena tidak ada petugas bengkel atau montir; terdapat alokasi anggaran untuk honor output kegiatan pada kegiatan pengelolaan gratifikasi senilai Rp14.000.000,00, tata laksana WBS senilai Rp14.400.000,00, pembangunan agen perubahan/tunas integritas senilai Rp14.400.000,00, dan pembinaan anti korupsi senilai Rp18.900.000,00 belum didukung dengan Surat Keputusan oleh Eselon I atau pihak yang berwenang.

B. KEGIATAN PENDUKUNG PENGAWASAN LAINNYA

1. Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Kegiatan Rapat Kerja Inspektorat Jenderal (Raker Itjen) tahun 2017 dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementan selama 4 (tiga) hari yaitu pada tanggal 3 s.d 6 Januari 2017, berlokasi di Hotel Haris, Sentul City Bogor, Propinsi Jawa Barat, yang dihadiri oleh 160 orang terdiri dari pejabat eselon II, pejabat struktural, perwakilan staf fungsional dan umum lingkup Inspektorat Jenderal serta perwakilan dari Eselon 1 lainnya lingkup Kementerian Pertanian. Tema yang diusung pada Raker Itjen kali ini adalah **“Tingkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern dengan Rekomendasi Strategis”**. Sesuai tema tersebut, perlu diupayakan peningkatan kapabilitas pengawasan intern dengan rekomendasi strategis antara lain penguatan hubungan koordinasi internal, penyusunan jadwal dan rencana kerja yang disepakati semua pihak serta

penyempurnaan acuan terhadap pedoman pengawasan yang disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Rapat secara resmi dibuka oleh Inspektur Jenderal, Justan Riduan Siahaan, Ak.M.ACC,CA, yang dalam sambutan pembukanya, beliau mengharapkan agar semua peserta dapat berpartisipasi dan berkontribusi untuk menyampaikan aspirasi dan kritik membangun, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi Itjen. Disampaikan pula bahwa kinerja Inspektorat Jenderal dapat dilihat dari dua acara pengukurannya yaitu menitikberatkan pada tupoksi Itjen dan melaksanakan amanah dari Menteri Pertanian dalam membangun design pertanian dan cyber pungli. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Pengawasan Intern atas akuntabilitas program kedaulatan pangan, mewujudkan penerapan SPI lingkup Kementerian Pertanian secara efektif serta meningkatkan kapabilitas Pengawasan Intern Itjen dari level 2 ke level 3.

2. Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017 telah melaksanakan Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16.
Kegiatan Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017

INSPEKTORAT	TAHAP	LOKASI	PELAKSANAAN
IR I	I	Kalsel, Sumsel, NTB, Sultra, Sumbar	23 sd 27/1/2017
	II	Kepri, Maluku Utara, Jateng, DIY	30/1 sd 3/2/2017
IR II	I	Sulsel, Sulteng, Aceh, Jabar	23 sd 27/1/2017
	II	Maluku, Papua Barat, Gorontalo, Sulut	30/1 sd 3/2/2017
IR III	I	Sulsel, Sulteng, Aceh, Jabar,	23 sd 27/1/2017
	II	Maluku, Papua Barat, Gorontalo, Sulut	30/1 sd 3/2/2017
IR IV	I	DKI Jakarta, Kalteng, Sulbar, NTT	23 sd 27/1/2017
	II	Riau, Kaltim, Kaltara, Bali	30/1 sd 3/2/2017

3. Kegiatan Bimbingan Teknis/Penilaian (Assesment) Maturitas Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Pertanian

Kegiatan Bimbingan Teknis/Penilaian (*assesment*) Maturitas Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Maturitas SPIP

Kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan Maturitas SPIP difokuskan pada pembinaan maturitas penyelenggaraan SPI Reformasi Birokrasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian serta meningkatkan *quality assurance* (QA) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Bimbingan teknis SPIP RB telah dilaksanakan di 7 (tujuh) UPT, yaitu 1) Balai Besar Veteriner Maros, 2) Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros, 3) Balai Pelatihan Pertanian Lampung, 4) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, 5) Pusat Veteriner Farma Surabaya, 6) Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru dan 7) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Makanan Ternak (BPTU-HMT) Sembawa.

Realisasi capaian rekomendasi sebanyak 133 rekomendasi atau 127,88% dari target output rekomendasi sebanyak 104 rekomendasi.

Capaian kinerja keuangan sebesar Rp170.861.000,00 atau 82,31% dari target sebesar Rp207.588.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp36.727.000,00 (per tanggal 31 Desember 2017).

b. Penilaian Maturitas SPIP

Inspektorat Investigasi telah melakukan penilaian Maturitas SPIP dengan menggunakan format sesuai Perka BPKP Nomer 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPI Lingkup Eselon I dan sebagai berikut:

Tabel 17.
Penilaian Maturitas SPIP Lingkup Eselon I Tahun 2017

NO	UNIT KERJA	NILAI	KATEGORI
1.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	4,50	Optimum
2.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	3,79	Terdefinisi
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	3,75	Terdefinisi
4.	Direktorat Jenderal Hortikultura	3,50	Terdefinisi
5.	Inspektorat Jenderal	3,46	Terdefinisi
6.	Sekretariat Jenderal	3,34	Terdefinisi
7.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	3,32	Terdefinisi
8.	Direktorat Jenderal Perkebunan	3,18	Terdefinisi
9.	Badan Ketahanan Pangan	3,07	Terdefinisi
10.	Badan Litbang Pertanian	2,91	Berkembang
11.	Badan Karantina Pertanian	2,87	Berkembang

Sumber Data: Inspektorat Investigasi 2017

Tabel 18.
Penilaian Maturitas SPIP Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017

Level Maturitas SPI	Eselon I	UPT	Jumlah	%
Level V Optimum	1	0	1	1,47
Level IV Terkelola dan Terstruktur	0	1	1	1,47
Level III Terdefinisi	8	28	36	52,94
Level II Berkembang	2	23	25	36,76
Level I Rintisan	0	5	5	7,35
Jumlah	11	57	68	100,00

Sumber Data: Inspektorat Investigasi 2017

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPI tingkat Eselon I 68 unit kerja dengan hasil termasuk kategori "Rintisan" sebanyak 5 unit kerja, kategori "Berkembang" sebanyak 25 unit kerja, kategori "Terdefinisi" sebanyak 36 unit kerja, kategori "Terkelola & Terstruktur" sebanyak 1 unit kerja dan kategori "Optimum" sebanyak 1 unit kerja.

Realisasi jumlah rekomendasi hasil penilaian maturitas SPI-RB sebanyak 139 rekomendasi atau 115,83% dari target 120 rekomendasi. Adapun capaian

kinerja keuangan sebesar Rp499.747.098,00 atau 97,75% dari target sebesar Rp511.236.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp11.488.902,00 (per tanggal 31 Desember 2017).

c. Forum Nasional SPIP

Kegiatan Forum Nasional SPIP dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 14 – 16 Desember 2017 bertempat di Eastparc Hotel Yogyakarta dengan peserta sebanyak 337 orang atau 112,3% dari target sebanyak 300 orang. Peserta berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Satker lingkup Kementerian Pertanian.

Narasumber Pembinaan Maturitas SPIP Internal berasal dari Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, BBPPTP Jombang, BPSB Jawa Barat, Balitsa Lembang, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan. Adapun narasumber dari eksternal berasal dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat selaku pembina SPIP Nasional. Materi pembinaan maturitas SPIP meliputi: 1) Kebijakan Maturitas Penyelenggaraan SPI pada Program dan Layanan Pertanian, 2) Strategi dan Kiat-Kiat Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPI menuju Level III, 3) Sharing Experience Implementasi SPIP Pengadaan Barang/Jasa, SPIP Pelaksanaan Kegiatan Utama dan SPIP Pelayanan Publik.

Capaian kinerja keuangan sebesar Rp861.350.800,00 atau 93,97% dari target sebesar Rp916.650.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp55.299.200,00 (per tanggal 31 Desember 2017)

Kegiatan Forum Nasional SPI lingkup Kementerian Pertanian dengan tema ***“Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pada Program Dan Layanan Pertanian Untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan”***.

Forum Nasional SPI menghasilkan pengembangan 8 (delapan) SPI, terdiri dari SPI Kegiatan Pokok, SPI Pelayanan dan SPI Pengadaan Barang/Jasa, yaitu:

- 1) SPI Kegiatan Pengadaan Vaksin Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Tahun 2017;
- 2) SPI Kegiatan Pengadaan Benih Ditjen Tanaman Pangan;
- 3) SPI Kegiatan Produksi Semen Beku pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2017;
- 4) SPI Sertifikasi Mutu Benih Komoditas Tebu pada BBP2TP Jombang;
- 5) SPI Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Malang
- 6) SPI Kegiatan Produksi Benih Sumber Bawang Merah Berbasis Sistem Manajemen Mutu Pada Balai Penelitian Tanaman Sayuran Tahun Anggaran 2018
- 7) SPI Kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan di BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
- 8) SPI Kegiatan Pengembangan Kawasan Jengkol pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 12.
Kegiatan Forum Nasional Sistem Pengendalian Intern



4. Pembinaan Tekad Anti Korupsi

Kegiatan Pembinaan Tekad Anti Korupsi di Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui: a) Pemasyarakatan Anti Korupsi, b) Pembinaan Anti Korupsi dan c) Penilaian Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi. Capaian kinerja masing-masing kegiatan dapat diinformasikan sebagai berikut:

a. Pemasyarakatan Anti Korupsi

Kegiatan pemasyarakatan antikorupsi bertujuan untuk mengajak dan mengikutsertakan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sekaligus menjadi pengawas bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian. Kegiatan pemasyarakatan anti korupsi dilaksanakan pada bulan Desember 2017 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2017 melalui kegiatan senam bersama. Kegiatan dilaksanakan di lapangan upacara Kantor Pusat Kementerian Pertanian dengan jumlah peserta sebanyak 750 orang, terdiri dari pimpinan dan pegawai pusat dan warga masyarakat disekitar kantor pusat Kementerian Pertanian.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan himbauan dan ajakan kepada seluruh peserta yang hadir untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam program dan layanan pertanian. Kegiatan kampanye pemberantasan korupsi mengusung tema, **“Bersama Berantas Korupsi untuk Wujudkan Swasembada Pangan Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045”**. Tema tersebut in-line dengan Tema Besar Hakordia Yang ditetapkan oleh KPK-RI, yaitu: Bersama Berantas Korupsi Untuk Kesejahteraan Rakyat.

Capaian kinerja keuangan sebesar Rp109.055.000,00 atau 93,97% dari target sebesar Rp157.912.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp48.857.000,00 (per tanggal 31 Desember 2017).

b. Pelaksanaan Pembinaan Tekad Antikorupsi

Pembinaan Tekad Antikorupsi Korupsi Melalui "Protani" Untuk Mewujudkan Program dan Layanan Pertanian yang Bersih dan Bebas Pungli. Pembinaan Tekad Antikorupsi pada Tahun 2017 ditargetkan sebanyak 2 kali dan terealisasi sebanyak 3 (tiga) kali, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16.
Kegiatan Forum Nasional Sistem

PROVINSI	JUMLAH PESERTA			PELAKSANAAN
	TARGET	REALISASI	%	
SULSEL	300	308	102,667	1 sd 3/8/2017
DIY	300	400	133,333	24 sd 27/10/2017
LAMPUNG	300	304	101,333	4 sd 6/12/2017

Peserta pembinaan terdiri dari pejabat struktural dan fungsional, unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian, dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi pertanian, mahasiswa STPP, petani, Babinsa serta undangan lainnya.

Pembinaan PROTANI menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Pertanian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dinas, Korem dan Motivator Antikorupsi.

Capaian kinerja keuangan sebesar Rp2.622.763.483,00 atau 93,54% dari target sebesar Rp2.803.784.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran senilai Rp181.020.517,00 (per tanggal 31 Desember 2016). Pada pelaksanaan kegiatan Protani-STPP di Yogyakarta, Inspektorat Investigasi memperoleh *sharing* dana dari Sekretariat dan Inspektorat I, II, III dan IV senilai Rp849.002.400,00.

c. Penilaian dan Penetapan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM)

Penilaian unit kerja WBK Tahun 2017 didasarkan atas Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM). Inspektorat Jenderal pada Tahun 2017 melakukan penilaian Pembangunan ZI-WBK-WBBM terhadap unit kerja pusat dan daerah.

Hasil penilaian terhadap 58 unit kerja dinyatakan lulus sebagai unit kerja berpredikat WBK yang terdiri dari 11 unit eselon I dan 47 unit pelaksana teknis. Penyerahan penghargaan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilakukan pada saat acara Forum SPIP di Yogyakarta oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 14 – 16 Desember 2017.

Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) Pembangunan ZI-WBK/WBBM yang ditetapkan dengan SK Mentan RI No.791/Kpts/KP.590/11/2017 tanggal 28 Nopember 2017 disajikan pada Lampiran 3.

Berdasarkan data Lampiran 3, hasil penilaian yang dilakukan pada 11 unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, seluruhnya atau 100% dinyatakan dengan predikat WBK dengan nilai rata-rata 77,45 sedangkan dari 53 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian yang dinilai, sebanyak 47 UPT atau 88,68% dinyatakan dengan predikat WBK. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, Inspektorat Jenderal telah mengusulkan 21 Unit Pelaksana Teknis untuk memperoleh predikat unit kerja WBK Nasional versi Kementerian PAN dan RB. Sebagai hasil atas Pembinaan Integritas Program dan Layanan lingkup Kementerian Pertanian terhadap seluruh Satuan Kerja/UPT lingkup Kementerian Pertanian, pada tahun 2017, Kementerian PAN dan RB menetapkan 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) Nasional, yaitu: Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor dan Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (Balitklimat) Bogor.

5. Pengendalian Gratifikasi

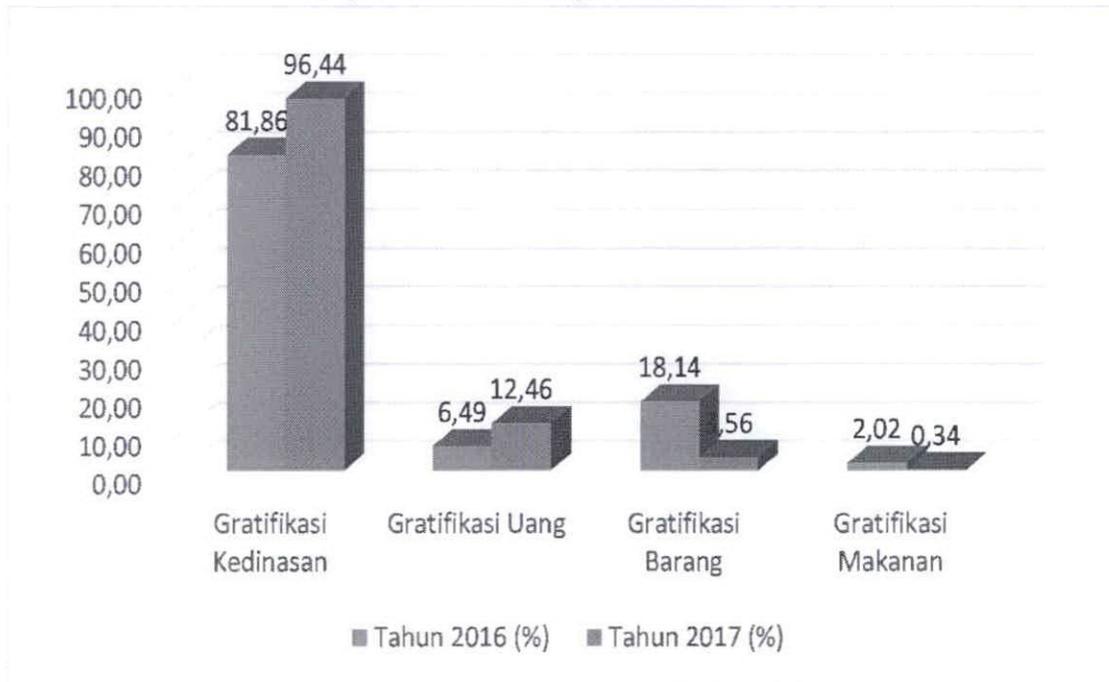
Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan kesadaran anti korupsi dan menekan tindakan KKN di lingkungan Kementerian Pertanian, telah diterbitkan Permentan No. 97/OT.210/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi dan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Kementerian Pertanian.

Inspektorat Investigasi selaku Sekretariat UPG Kementerian Pertanian secara rutin telah melaporkan perkembangan penerimaan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap bulan dan triwulan. Laporan UPG Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17.
Laporan Unit Pengelola Gratifikasi Tahun 2017

No	Jenis Laporan	2016		2017	
		Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Gratifikasi Kedinasan	208.666.300	81,86	410.097.584,00	96,44
2	Gratifikasi Uang	16.556.002	6,49	53.000.300,00	12,46
2	Gratifikasi Barang	46.254.200	18,14	15.145.000,00	3,56
3	Gratifikasi Makanan	5.140.000	2,02	1.432.000,00	0,34
Jumlah Gratifikasi		254.920.500,00		425.242.584,00	

Gambar 13.
Laporan Unit Pengelola Gratifikasi



Sebagaimana grafik diatas memperlihatkan bahwa kesadaran aparatur sipil negara untuk melaporkan gratifikasi kedinasan cukup tinggi dan tingkat penolakan terhadap gratifikasi berupa makanan berkurang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Kementerian Pertanian pada kategori Kementerian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2017 dengan diluncurkan secara online aplikasi pelayanan gratifikasi online di <http://sigap-upg.pertanian.go.id>

Prestasi ini sebagai bentuk komitmen Inspektorat Jenderal dalam menginisiasi seluruh pegawai lingkup Kementerian Pertanian dalam mewujudkan nilai-nilai KKPID (Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas, dan Disiplin) bagi ASN Kementerian Pertanian.

Gambar 14.
Piagam Penghargaan Kementerian Pertanian
Dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik

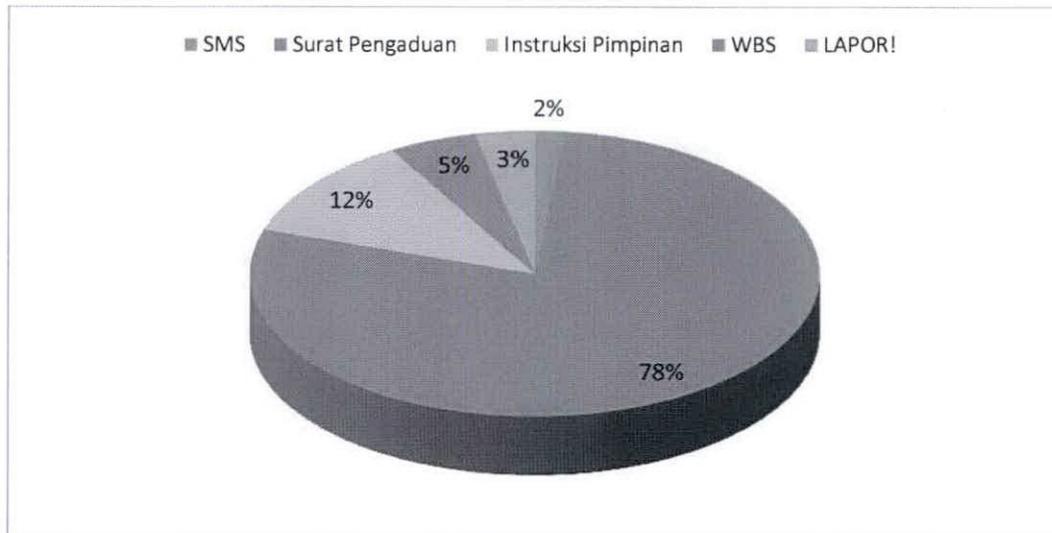


6. Penanganan Pengaduan Masyarakat

a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan WBS

Pengelolaan pengaduan masyarakat dan WBS di Kementerian Pertanian ditangani oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 788/Kpts/OT.210/H/06/2014 tentang Administratur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaan WBS Kementerian Pertanian. Berdasarkan data pengaduan masyarakat yang masuk tahun 2017, bahwa Inspektorat Investigasi menerima 60 pengaduan terdiri dari pengaduan melalui SMS sebanyak 1 pengaduan, pengaduan melalui surat sebanyak 47 pengaduan, instruksi pimpinan sebanyak 7 pengaduan dan pengaduan melalui pesan WBS sebanyak 3 pengaduan. Selain itu terdapat pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang diterapkan Kedeputusan I Kantor Staf Kepresidenan, sebanyak 2 pengaduan. Saat ini pengelolaan LAPOR dan SMS berada di Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Gambar 15.
Pengaduan Masyarakat Tahun 2017



b. Tindak lanjut Atas Pengaduan Masyarakat

Terhadap pengaduan yang telah diterima, sebanyak 61 pengaduan telah ditindaklanjuti dengan dilakukan telaahan, sebanyak 39 pengaduan atau 63,93% memenuhi unsur-unsur pengawasan (berkadar pengawasan), sisanya sebanyak 22 aduan atau 36,07% tidak memenuhi unsur-unsur pengawasan (tidak berkadar pengawasan), sehingga tidak ditindaklanjuti. Adapun 2 pengaduan (5,13%) ditindaklanjuti dengan audit investigasi dan 37 pengaduan (94,87%) ditindaklanjuti dengan audit tujuan tertentu.

Jenis materi pengaduan yang ditindaklanjuti melalui audit investigatif atau audit tujuan tertentu pada tahun 2017, terkait adanya dugaan pelanggaran: (a) pengadaan barang/jasa, (b) kode etik pegawai, (c) penyaluran dana bantuan sosial (bansos) ke kelompok tani penerima, (d) kinerja pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan (e) pengelolaan dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

c. Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat telah dilakukan oleh Inspektorat investigasi, namun terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyempurnaan, diantaranya penertiban pencatatan pengaduan yang masuk dan yang telah ditindaklanjuti, baik melalui SMS maupun melalui surat.

C. PENINGKATAN KAPABILITAS

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan

a. Diklat Qualified Internal Audit (QIA)

Tujuan Diklat Qualified Internal Audit adalah agar auditor memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sejajar dengan kualifikasi auditor internal tingkat internasional. Dengan diklat tersebut diharapkan membantu organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin, untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan pengelolaan resiko, pengendalian dan proses tata kelola serta mendorong lembaga pengawas internal mencapai IACM level 3 dan maturitas SPIP Kementerian Pertanian.

Diklat Qualified Internal Audit diselenggarakan selama 8 (delapan) hari bertempat di Bintaro Banten. Diklat ini diselenggarakan oleh BPKP bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Auditor (YPIA). Peserta Diklat Qualified Internal Audit adalah Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Sebagai syarat dan untuk memperoleh sertifikasi dari QIA telah dilakukan penyusunan makalah dengan judul "Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai Assurance dalam Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan".

b. Diklat Sertifikasi JFA Penjurangan Auditor Madya

Penyelenggaraan diklat ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern.

Diklat Sertifikasi JFA Penjurangan Auditor Madya diselenggarakan di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) di Ciawi Bogor. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Justan Riduan Siahaan, Ak,M.Acc, CA, QIA serta dihadiri Kepala PPMKP dan Kepala Pusdiklatwas BPKP.

Jumlah peserta sebanyak 26 orang, dengan rincian sebagai berikut Inspektorat I sebanyak 6 orang; Inspektorat II sebanyak 6 orang; Inspektorat III sebanyak 5 orang; Inspektorat IV sebanyak 4 orang dan Inspektorat Investigasi sebanyak 5 orang.

Sasaran dari diklat tersebut diharapkan terwujudnya auditor yang (1) memiliki pengetahuan,keahlian/keterampilan dan sikap professional sesuai dengan Standar Kompetensi Auditor; (2) mampu mengimplementasikan pengetahuan keahlian/keterampilan dan sikap professional yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan secara efisien dan efektif; (3) mampu memelihara dan mengembangkan pengetahuan, keahlian/keterampilan dan sikap professional secara berkelanjutan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.

c. Diklat Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2017

Laporan hasil pengawasan dapat dikatakan professional jika memiliki substansi yang bermutu, menggunakan bahasa yang baik, serta mengacu pada ketentuan/standar pelaporan yang berlaku. Informasi yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Untuk itu auditor perlu

mengikuti diklat penyusunan laporan hasil pengawasan yang bertujuan agar auditor mampu melaksanakan tugas-tugas audit intern yang memerlukan analisis dan pertimbangan professional yang tinggi dan mampu mengendalikan teknis pelaksanaan audit intern.

Jumlah peserta diklat sebanyak 30 orang, dengan rincian sebagai berikut Inspektorat I sebanyak 6 orang; Inspektorat II sebanyak 6 orang; Inspektorat III sebanyak 6 orang; Inspektorat IV sebanyak 6 orang dan Inspektorat Investigasi sebanyak 6 orang.

Sasaran dari diklat tersebut diharapkan peserta mampu menyusun laporan hasil pengawasan yang professional.

2. Pelaksanaan peningkatan Kapabilitas APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) / IACM (*Internal Audit Capability Model*)

IACM (*Internal Audit Capability Model*) pada dasarnya merupakan *tools* dalam meningkatkan kapabilitas yang merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumberdaya manusia agar melaksanakan peran dan fungsi yang efektif.

Untuk meningkatkan kapabilitas APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sebagai *shareholder* APIP serta pimpinan APIP sendiri. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi Pembina APIP telah mengadopsi model penilaian IIA dalam sebuah pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1633/K/JF/2011 tentang pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 tahun 2015 tentang *grand design* peningkatan kapabilitas APIP. Penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP didapatkan hasil bahwa APIP di level I ada 85%, level II 14% dan Level III 1%, terkait hal itu, Presiden memberi target 5 tahun agar BPKP lebih meningkatkan kapabilitas APIP di level III menjadi 85% pada tahun 2019.

Pada bulan Desember 2017 BPKP telah melakukan Validasi Hasil *Assesment* (Evaluasi) Tata Kelola Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Semester II Tahun 2016 dengan hasil penilaian kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berada pada Level 3 (Integrated). Upaya perbaikan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal dalam pemenuhan seluruh pernyataan pada level 2 untuk menuju Level 3 (Integrated) adalah:

1. Menyusun pedoman atau SOP Pengawasan Lain yang terkait dengan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian.
2. Menyusun peta kompetensi pegawai yang berisi *competency gap* pada setiap pegawai dibandingkan dengan kompetensi yang seharusnya dibutuhkan.
3. Menyusun program perolehan sertifikasi profesi internal auditor (CIA, CGAP, CFE)
4. Menyusun pedoman *reward and punishment* baik bagi auditor maupun pegawai sekretariat dengan kriteria prestasi yang jelas dan terukur
5. Menyusun pedoman kerjasama audit dengan berbagai pihak jika kemampuan auditor dipandang tidak cukup untuk melaksanakan penugasan tertentu.
6. Menyusun kode etik profesi auditor
7. Menyusun pedoman pemberian penghargaan bagi tim yang berhasil dengan ukuran capaian perilaku yang dapat diukur
8. Melakukan audit terhadap Satker yang memiliki risiko tinggi sesuai peta auditan yang telah dibuat
9. Menyusun SOP penggunaan Tenaga Ahli / Konsultan yang kompeten apabila risiko yang terjadi tidak dapat ditangani oleh APiP
10. Melakukan penilaian internal Tim (PM menilai PT, KT dan AT; PT menilai KT dan AT; KT menilai AT) pada setiap penugasan dan dilaporkan kepada Manajemen; Membuat Kertas Kerja Penilaian terhadap hasil supervisi tahapan pekerjaan pengawasan

11. Melakukan penilaian internal berupa telaah sejawat, untuk mendukung langkah tersebut telah dibuat Pedoman Umum dan Program Kerja *Peer Review*.
12. Melakukan tindaklanjut rekomendasi hasil telaahan sejawat, dan menindaklanjuti rekomendasi yang dinyatakan dalam laporan QAIP.
13. Melakukan survey kepuasan pengguna laporan atau mengadakan pertemuan rutin dengan pengguna / *Stakeholder* untuk mendapatkan respon terkait informasi laporan
14. Melakukan analisis *Variance* Biaya dengan cara melakukan identifikasi penugasan yang telah dilaksanakan dan rumusan besaran biaya yang telah direalisasi.
15. Melengkapi dokumen monitoring sistem manajemen biaya, yang terdiri dari *unit cost* yang telah digunakan dengan mengacu kepada PMK terbaru tentang Perjalanan Dinas.
16. Melaksanakan tindaklanjut hasil analisis *variance* dan dokumen monitoring sistem manajemen biaya, untuk perbaikan kebijakan.
17. Melengkapi dokumen sistem Manajemen kinerja / SOP yang mengatur pengembangan dan penetapan *Key Performance Indicator* (KPI)
18. Melengkapi dokumen sistem manajemen kinerja, dengan identifikasi data kinerja, frekuensi pengumpulan data, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang melaksanakan dan siapa yang menerima laporan data kinerja.
19. Membuat sistem untuk pengembangan / penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) yang dapat mengukur kinerja aktivitas APIP pelaksanaan audit, revidu dan pengawalan.
20. Melengkapi Dokumen KPI dengan parameter yang atas, sehingga dapat diukur secara kuantitatif.
21. Melengkapi Dokumen monitoring pengukuran dan analisis kinerja KPI dengan tujuan yang telah ditetapkan.
22. Mengintensifkan pemantauan laporan kegiatan pengawasan intern dibuat secara rutin perbulan, triwulan pada masing-masing bagian.

23. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana dibandingkan dengan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
24. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana dikaitkan dengan pencapaian tujuan program pembangunan pertanian yang telah ditetapkan (produksi komoditas).
25. Menyusun SOP penyusunan PKPT berbasis risiko; Menyusun PKPT berbasis risiko.
26. Menyusun *Data Base* Risiko Kegiatan Pokok lingkup Kementan; Menyusun kebijakan/SOP (KSOP) Penyusunan PKPT berbasis risiko; Menyusun KSOP Pengusulan Anggaran Pengawasan Berbasis Risiko.
27. Menyusun KSOP Pengusulan Sumberdaya (SDM, Anggaran, Sarpras) Pengawasan berbasis risiko
28. Menyusun *Template* Laporan Hasil Reviu Anggaran (LHRA); Menyusun KSOP Penyampaian LHRA kepada Menteri per Triwulan.
29. Menyusun KSOP Penyampaian rekomendasi bagi pimpinan K/L/Pemda berdasarkan hasil pengawasan; Sosialisasi/Internalisasi KSOP Penyampaian rekomendasi bagi pimpinan K/L/Pemda berdasarkan hasil pengawasan; Menyusun Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan sesuai dengan Lampiran I Permen PAN dan RB Nomor 42 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP; Menyusun jenis-jenis layanan pengawasan Itjentan (Pengendalian Intern, *Risk Management* dan *Tatakelola/Good Governance*); Mengomunikasikan jenis-jenis layanan pengawasan Itjentan (Pengendalian Intern, *Risk Management* dan *Tatakelola/Good Governance*).
30. Menyusun Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan sesuai dengan Lampiran I Permen PAN dan RB Nomor 42 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP; Menyusun Jadwal Pertemuan dengan pimpinan (Menteri, Eselon I dan Pimpinan Satker); Menyusun kebijakan dan prosedur komunikasi, interaksi dan laporan dengan Pimpinan, komite dan pimpinan auditan; Sosialisasi/ Internalisasi KSOP komunikasi, interaksi dan laporan dengan Pimpinan, komite & pimpinan auditan.

D. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Sejak tahun anggaran sebelum 2013 sampai dengan 2017 jumlah kerugian negara yang diinventarisir sejumlah Rp267.349.238.489,14. Dari jumlah temuan kerugian negara tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp230.552.571.390,45 atau 86,24% sehingga masih terdapat sisa kerugian negara sebesar 36.796.667.098,69 atau 13,76%. Dari hasil jumlah temuan kerugian negara tahun 2013 s.d 2017 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 18.
Deskripsi Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun 2013 s.d. 2017

Tahun	Nilai KN	Ditindaklanjuti		Sisa	
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
sd. 2013	127.493.495.428,74	110.226.178.232,02	86,46	17.267.317.196,72	13,54
2014	42.360.424.265,21	38.961.220.317,71	91,98	3.399.203.947,50	8,02
2015	66.631.354.232,16	65.845.298.914,41	98,82	786.055.317,75	1,18
2016	24.325.195.618,95	13.428.495.025,98	55,20	10.896.700.592,97	44,80
2017	6.538.768.944,08	2.091.378.900,33	31,98	4.447.390.043,75	68,02
Total	267.349.238.489,14	230.552.571.390,45	86,24	36.796.667.098,69	13,76

Sumber Data: dari Bagian DPLHP

Data persebaran kerugian negara per unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19.
Data Nilai Kerugian Negara Per Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017

ESELON I	Nilai KN	Ditindaklanjuti	Sisa	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Sekretariat Jenderal	249.916.570,00	-	249.916.570,00	-
Inspektorat Jenderal	-	-	-	-
Ditjen Tanaman Pangan	1.871.615.636,92	758.186.893,41	1.113.428.743,51	40,51
Ditjen Hortikultura	1.187.145.990,00	493.417.904,00	693.728.086,00	41,56
Ditjen Perkebunan	479.945.092,98	29.852.750,00	450.092.342,98	6,22
Ditjen PKH	581.588.924,47	206.920.172,77	374.668.751,70	35,58
Ditjen PSP	-	-	-	-
Badan Litbang Pertanian	1.777.379.970,40	265.158.350,84	1.512.221.619,56	14,92
Badan PPSDM Pertanian	189.931.858,00	183.910.838,00	6.021.020,00	96,83
Badan Ketahanan Pangan	50.964.540,00	50.964.540,00	-	100,00
Barantan	150.280.361,31	102.967.451,31	47.312.910,00	68,52
Jumlah	6.538.768.944,08	2.091.378.900,33	4.447.390.043,75	31,98

Sumber Data: dari Bagian DPLHP

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah temuan kerugian negara terbesar adalah pada Ditjen Tanaman Pangan yaitu Rp1.871.615.636,92 atau 40,51% dari seluruh temuan kerugian negara, sedangkan jumlah temuan kerugian negara paling kecil adalah pada Badan Ketahanan Pangan yaitu sebesar Rp50.964.540,00 atau 100% dari seluruh temuan kerugian negara.

Secara umum, upaya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya pemantauan dan tindak lanjut atas kerugian negara telah diupayakan dengan maksimal.

E. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal melalui serangkaian kegiatan pengawasan. Pada tahun 2017 selain pengadaan sarana dan prasarana seperti meja rapat, kursi, handy talky, obat-obatan dan lain-lain, serta pengadaan jasa desain dan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS).

Secara ringkas beberapa jumlah dan kondisi sarana yang pengadaan di tahun 2017 tertera pada tabel dibawah ini :

BAB VI P E N U T U P

Pada tahun 2017 secara umum capaian kegiatan Inspektorat Jenderal telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian masih diperlukan pengendalian yang lebih efektif sehingga pelaksanaan program/kegiatan lebih akuntabel dari sisi pelaporan, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dikelola. Hal tersebut perlu dilakukan agar laporan tahunan ini lebih efektif sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh pimpinan dan lebih bermanfaat bagi *stakeholder*.

Lampiran 1. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017

No	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH OUTPUT			KET		
			PAGU	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%			
			Rp.	Rp.		OUTPUT	OUTPUT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
018.02.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN	92.439.375.000	85.722.719.223	92,73					115,45	
I	1755	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan BPPSDMP	10.515.100.000	9.522.522.277	90,56	197 Rekomendasi	239 Rekomendasi	121,32			
	1755.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	4.611.036.000	4.380.926.631	95,01	170 Rekomendasi	207 Rekomendasi	121,76			
		K01 Audit Kinerja Satker Pusat lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP	438.990.000	387.386.416							
		K02 Audit Kinerja Satker di Daerah	4.172.046.000	4.134.552.081							
	1755.011	Rekomendasi Pengawasan lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP	1.438.572.000	1.354.312.584	94,14	7 Rekomendasi	9 Rekomendasi	129			
	1755.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP serta SAKIP Kementerian	541.952.000	455.582.900	84,06	14 Rekomendasi	16 Rekomendasi	114			
		K01 Evaluasi SAKIP Kementerian	106.830.000	105.794.400							
		K02 Evaluasi terhadap SAKIP Es I lingkup Kementerian di Pusat dan Daerah	435.122.000	422.130.000							
	1755.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK lingkup Setjen, Ditjen Horti, BPPSDMP serta LK Kementerian	742.114.000	638.437.725	86,03	5 Rekomendasi	6 Rekomendasi	120			
		051 Pelaksanaan Reviu LK	649.114.000	646.376.800							
		052 Penyusunan Laporan Hasil Reviu LK	93.000.000	86.236.500							
	1755.965	Layanan Audit Internal	3.181.426.000	2.693.262.437	84,66	1 Layanan	1 Layanan	100			
		056 Kegiatan pengawasan lainnya lingkup Inspektorat I	3.181.426.000	2.707.730.606							
		A Audit BMN dalam rangka Mendukung Gerakan WTP	528.400.000	517.340.600							
		B Pendampingan Workshop Penyusunan LK Es I dalam Rangka Mendukung Gerakan WTP	388.032.000	373.989.400							
		C Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Swasembada Pangan	799.456.000	639.049.234							
		D Reviu RKA-K/L Mitra Kerja Inspektorat I	177.600.000	172.924.100							
		F Penyelenggaraan SPI di lingkup Inspektorat I	44.200.000	-							
		G Penyusunan Program/Kegiatan dan Laporan Lingkup Inspektorat I	427.200.000	302.860.000							
		H Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	79.200.000	59.938.500							
		I Rapat Koordinasi/Keja/Dinas/Kelompok Kerja/Konsultasi	378.068.000	369.515.372							
		J Penyusunan LAKN Inspektorat I Tahun 2016	18.600.000	-							
		K Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa	41.040.000	39.210.000							
		L Reviu Telaah Sejawat	25.200.000	7.560.000							
		M Assesor PMPRB	4.200.000	-							
		N Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Hasil Tindak Lanjut Audit BPK RI	270.230.000	225.343.400							
II	1756	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	10.512.300.000	10.167.491.439	96,72	229 Rekomendasi	267 Rekomendasi	116,59			
	1756.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen TP dan Ditjen	4.623.652.000	4.518.591.044	97,73	126 Rekomendasi	151 Rekomendasi	119,84			
		K01 Audit Kinerja Satker Pusat lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	317.860.000	309.693.000							
		K02 Audit Kinerja Satker di Daerah	4.305.792.000	4.265.023.377							
	1756.011	Rekomendasi Pengawasan lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	1.438.572.000	1.368.828.940	95,15	88 Rekomendasi	99 Rekomendasi	112,50			
	1756.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	415.832.000	357.293.400	85,92	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100,00			
	1756.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	457.752.000	441.372.488	96,42	12 Rekomendasi	14 Rekomendasi	116,67			
	1756.965	Layanan Audit Internal	3.576.492.000	3.481.405.567	97,34	1 Layanan	1 Layanan	100,00			
		055 Evaluasi Strategis lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	410.362.000	1.068.771.800							
		A Evaluasi Komoditas Strategis (Cetak Sawah)	410.362.000	1.068.771.800							
		056 Kegiatan pengawasan lainnya lingkup Inspektorat II	3.166.130.000	2.465.715.090							
		A Audit BMN dalam rangka Mendukung Gerakan WTP	830.486.000	829.643.900							
		B Pendampingan Workshop Penyusunan LK Es I dalam Rangka Mendukung Gerakan WTP	387.816.000	300.709.400							
		C Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Swasembada Pangan	1.412.808.000	924.842.090							
		D Reviu RKA-K/L Mitra Kerja Inspektorat II	177.600.000	62.175.000							
		F Penyelenggaraan SPI di lingkup Inspektorat II	44.200.000	109.185.000							
		G Reviu Pedoman/Juklak/Juknis Eselon I Mitra Inspektorat II	129.720.000	24.200.000							
		H Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	34.800.000	56.525.000							
		I Rapat Koordinasi/Keja/Dinas/Kelompok Kerja/Konsultasi	130.100.000	131.734.700							
		J Penyusunan LAKN Inspektorat II Tahun 2016	18.600.000	26.700.000							

III	1757	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP	9.735.600.000	9.138.055.328	93,86	250 Rekomendasi	285 Rekomendasi	114,00	
	1757.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang dan BKP	4.631.076.000	4.548.886.237	98,25	178 Rekomendasi	199 Rekomendasi	111,80	
		K01 Audit Kinerja Satker Pusat lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang, BKP	459.030.000	436.785.500					
		K02 Audit Kinerja Satker di Daerah	4.172.046.000	4.160.950.202					
	1757.011	Rekomendasi Pengawasan lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang, BKP	1.438.572.000	1.359.919.081	94,53	50 Rekomendasi	60 Rekomendasi	120,00	
	1757.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang,	427.472.000	369.160.800	86,36	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100,00	
	1757.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbang, BKP	447.094.000	390.183.138	87,27	18 Rekomendasi	22 Rekomendasi	122,22	
	1757.965	Layanan Audit Internal	2.791.386.000	2.468.906.072	88,45	1 Layanan	1 Layanan	100,00	
		056 Kegiatan pengawasan lainnya lingkup Inspektorat III	2.791.386.000	2.499.027.453					
		A Audit BMN dalam rangka Mendukung Gerakan WTP	1.098.772.000	1.094.604.860					
		B Pendampingan Workshop Penyusunan LK Es I dalam Rangka Mendukung Gerakan WTP	347.100.000	346.450.500					
		C Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Swasembada Pangan	491.520.000	461.829.004					
		D Reviu RKA-K/L Mitra Kerja Inspektorat III	65.699.000	65.199.000					
		F Penyelenggaraan SPP di lingkup Inspektorat III	20.250.000	-					
		H Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	79.100.000	54.377.500					
		I Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Kelompok Kerja/Konsultasi	251.103.000	213.260.089					
		J Penyusunan LAKIN Inspektorat III Tahun 2016	10.672.000	-					
		K Persiapan dan Penyusunan Laporan Pengawasan lingkup Inspektorat III	317.970.000	231.207.000					
		L Pelaksanaan Vertikasi/Gagal Bayar	109.200.000	32.099.500					
		M Tindak Lanjut Hasil temuan BPK	84.000.000	7.000.000					
IV	1758	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina	9.675.800.000	9.301.859.164	96,14	202 Rekomendasi	225 Rekomendasi	111,39	
	1758.010	Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	4.616.076.000	4.503.209.483	97,55	150 Rekomendasi	159 Rekomendasi	106,00	
		K01 Audit Kinerja Satker Pusat lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	444.030.000	425.151.344					
		K02 Audit Kinerja Satker di Daerah	4.172.046.000	4.163.175.724					
	1758.011	Rekomendasi Pengawasan lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	1.438.572.000	1.415.203.112	98,38	36 Rekomendasi	45 Rekomendasi	125,00	
	1758.012	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Ditjen PKH, Barantan	412.472.000	407.495.200	98,79	5 Rekomendasi	6 Rekomendasi	120,00	
	1758.013	Rekomendasi Hasil Reviu LK lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	432.094.000	429.252.080	99,34	10 Rekomendasi	14 Rekomendasi	140,00	
	1758.965	Layanan Audit Internal	2.776.586.000	2.546.699.289	91,72	1 Layanan	1 Layanan	100,00	
		055 Evaluasi Strategis lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen PKH dan Barantan	657.390.000	664.659.000					
		056 Kegiatan pengawasan lainnya lingkup Inspektorat IV	2.119.196.000	1.895.907.889					
		A Audit BMN dalam rangka Mendukung Gerakan WTP	369.900.000	346.802.228					
		B Pendampingan Workshop Penyusunan LK Es I dalam Rangka Mendukung Gerakan WTP	256.674.000	251.552.500					
		C Reviu/Penelaahan/Kajian/Peraturan/Pedoman/Ketentuan Lain	83.500.000	21.210.000					
		D Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	51.186.000	40.879.000					
		E Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Kelompok Kerja/Konsultasi	363.300.000	362.393.640					
		F Fasilitasi Audit di Lapangan	24.750.000	1.100.000					
		G Reviu RKA-K/L	88.250.000	85.044.020					
		H Pendampingan Inspektur dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan	486.304.000	436.575.572					
		I Penyelenggaraan SPP di lingkup Inspektorat IV	136.720.000	121.560.000					
		J Pendampingan Inspektur dalam rangka mendukung UPSUS SIWAB	96.712.000	74.408.109					
		K Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan pada Eselon I lingkup Inspektorat	10.500.000	9.030.000					
		L Workshop SAKIP	151.400.000	145.352.820					

V	1759	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada satker lingkup Kementerian Pertanian	10.584.800.000	9.704.018.055	91,68	1 Layanan	1 Layanan	100,00
	1759.965	Layanan Audit Internal	10.584.800.000	9.704.018.055	91,68	1 Layanan	1 Layanan	100,00
		051 Audit Investigasi lingkup Kementerian Pertanian	115.828.000	67.745.284	58,49			
		052 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu lingkup Kementan	4.859.846.000	4.723.486.816	97,19			
		053 Pembinaan/Penilaian (Assesment) Maturitas SPP lingkup Kementan	1.635.474.000	1.531.958.898	93,67			
		A Penilaian SPP	511.236.000	499.747.098				
		B Pembinaan SPP	207.588.000	170.861.000				
		C Forum SPP	916.650.000	861.350.800				
		054 Pembinaan/Penilaian Mandiri (Self Assesment) ZI WBK/WBBM	3.723.631.000	3.445.453.400	92,53			
		A Pembinaan Anti Korupsi	2.803.784.000	2.622.763.483	93,54			
		B Pemasarakatan Anti Korupsi	157.912.000	109.055.000	69,06			
		C Penilaian WBK	713.735.000	713.634.917	99,99			
		D Pengelolaan Gratifikasi	3.600.000	-				
		G Workshop Komite Integritas	44.600.000	-				
		055 Kegiatan Pengawasan Lainnya lingkup Inspektorat Investigasi	250.021.000	142.531.700	57,01			
		A Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Kelompok Kerja/Konsultasi	93.296.000	54.370.700	58,28			
		B Fasilitas Audit di Lapangan	117.100.000	49.901.000	42,61			
		C Pelatihan/seminar/pendalaman materi intern	39.625.000	38.260.000	96,56			
VI	1760	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat	41.415.775.000	37.888.772.960	91,48	14	14	100,00
	1760.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	13.402.411.000	11.714.481.378	87,41	1 Layanan	1 Layanan	
		051 Penyusunan Rencana Program	2.751.385.000	2.694.764.843				
		A Penyusunan PKAT	86.000.000	63.440.000				
		B Inventarisasi Data Satker dalam rangka Validasi PBJ dan Survei IACM	2.665.385.000	2.631.324.843				
		052 Penyusunan Rencana Anggaran	873.430.000	517.326.400	59,23			
		A Penyusunan RKA-K/L	115.800.000	83.845.000				
		B Penyusunan SBK I/ten	43.000.000	29.310.000				
		C Penyusunan RKT I/ten	21.650.000	-				
		D Temu Koordinasi Perencanaan	223.130.000	168.171.900				
		E Penyusunan PPA dan ROK I/ten	21.650.000	19.740.000				
		F Pelaksanaan Reviu RKA-K/L	210.401.000	6.160.000				
		G Koordinasi Pelaksanaan APBN-P Tahun 2017	82.849.000	82.319.500				
		H Workshop Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Cascading Kinerja Lingkup I/ten	154.950.000	127.780.000				
		053 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	4.023.627.000	3.547.251.301	88,16			
		C Penyusunan Laporan Semester I dan Semester II	21.650.000	17.430.000				
		E Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penganggaran (PMK 249/2011)	10.825.000	7.690.000				
		F Penyusunan Laporan Tahunan I/ten	10.825.000	7.770.000				
		G Penyusunan Laporan AKIP I/ten (LAKIN)	26.300.000	17.640.000				
		H Penyusunan Laporan Tahunan APIP	21.650.000	13.190.000				
		I Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka Swasembada Pangan	2.687.147.000	2.431.015.141				
		J Penyusunan Laporan IACM I/ten	90.800.000	32.250.000	35,52			
		K Pelaksanaan Evaluasi Atase Pertanian	372.175.000	293.365.110				
		L Pelaksanaan PENAS di Aceh	782.255.000	726.901.050				
		054 Pengelolaan Data dan Informasi	609.430.000	522.092.500	85,67			
		A Pelaksanaan Analisis LHP	51.800.000	51.338.000				
		B Monitoring Tindaklanjut Hasil Pengawasan	155.400.000	151.860.500				
		C Pemutakhiran Data LHP BPK/BPKP	77.000.000	57.350.000				
		D Pemutakhiran Data LHP I/ten	51.800.000	51.670.000				
		E Penyusunan Peta Rawan Penyimpangan dan KN	51.800.000	51.460.000				
		F Temu Koordinasi Tindaklanjut Hasil Pengawasan	221.630.000	158.414.000				

	055 Pengelolaan Keuangan	907.960.000	852.170.500	93,86		
	A Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan	543.500.000	535.835.500			
	B Penyusunan Daftar Gaji Induk	51.000.000	43.157.000			
	C Pemberkasan dan Penataan Arsip/Dokumen	126.300.000	126.021.000			
	D Penyusunan Tunjangan Kinerja dan Uang Mekan	60.960.000	54.402.000			
	E Penyusunan Dosir dan Pajak	20.320.000	13.655.000			
	F Verifikasi dan Klasifikasi Arsip LHA	5.080.000	4.815.000			
	G Monitoring, Pemeliharaan dan Perawatan Arsip	50.400.000	35.000.000			
	H Penilaian dan Penyusutan Arsip (Pemindahan dan Pemusnahan)	50.400.000	39.285.000			
	058 Pengelolaan Kepegawaian	1.197.575.000	1.097.223.400	91,62		
	A Pelaksanaan Seminar Bidang Pengawasan	145.287.000	142.642.500			
	C Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	158.125.000	142.258.000			
	D Penyiapan Bahan Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur dan Pelayanan Publik lingkup Ijen	16.800.000	9.260.000			
	E Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit	55.950.000	50.935.000			
	F Penyusunan Rencana Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Penjenjangan	157.154.000	131.865.000			
	G Pembinaan Mental dan Jasmani PNS	210.275.000	170.021.500			
	H In House Training	67.496.000	65.764.000			
	I Pelaksanaan Diklat Penjenjangan Auditor Madya	254.638.000	252.627.400			
	J Diklat Penyusunan LHP	131.850.000	131.850.000			
	059 Pelayanan Umum dan Perlengkapan	2.126.558.000	1.952.500.646	91,82		
	A Honor Pengelolaan SAK	25.200.000	25.157.000			
	B Penyusunan SIMAK-BMN	72.900.000	72.706.000			
	C Inventarisasi BMN Ijen	1.044.276.000	955.002.980			
	D Penghapusan BMN Ijen	88.400.000	71.695.000			
	E Dokumen KB dan DBR BMN/Penilaian BMN	54.000.000	48.575.000			
	F Pelaksanaan Rapat Kerja lingkup Ijen	389.472.000	360.100.800			
	G Temu Koordinasi Keuangan dan Perlengkapan	284.740.000	284.373.866			
	H Penyusunan Laporan Keuangan (LK)	51.000.000	25.815.000			
	J Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Audited	8.500.000	4.450.000			
	K Persiapan Pemeksaan BPK	8.500.000	8.100.000			
	L Pelaksanaan PSP BMN	24.300.000	24.290.000			
	M Pelaksanaan Wasdal BMN	28.980.000	28.495.000			
	N Evaluasi Pengadaan BJJ	21.990.000	21.345.000			
	O Evaluasi Pelayanan Perkantoran	24.300.000	22.395.000			
	061 Pelayanan Humas dan Protokol	779.096.000	685.110.084	87,94		
	A Penilaian Karya Tulis Ilmiah (KTI)	37.350.000	25.350.000			
	B Penyusunan dan Pembuatan Layout Media Auditor	174.380.000	152.883.000			
	C Pelaksanaan Evaluasi LAPOR	36.350.000	27.995.000			
	D Penyusunan Desain dan Artikel Website	43.075.000	28.670.000			
	E Penyelenggaraan Temu Koordinasi Kehumasan Eselon I	57.000.000	52.285.000			
	F Temu Koordinasi OKHH	315.536.000	304.732.884			
	G Penyelenggaraan PPD	36.850.000	36.575.000			
	H Penyelenggaraan Peraturan Perundang-undangan	32.950.000	11.140.000			
	I Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia	45.605.000	45.479.200			
	062 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan RB	133.350.000	72.425.000	54,31		
	A Operasional Satak PI	48.500.000	2.300.000			
	B Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	84.850.000	70.125.000			
1760.951	Layanan Internal	2.010.364.000	1.969.604.047	97,97	1 Layanan	1 Layanan
	051 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	1.056.648.000	1.177.531.640			
	A Pengadaan Sistem Informasi Pengawasan	501.560.000	422.514.340			
	B Alat Pengolah Data dan Informasi	555.088.000	755.017.300			
	052 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	200.860.000	251.662.407			
	053 Pengadaan Kendaraan Bermotor	752.856.000	540.410.000			
1760.994	Layanan Perkantoran	26.003.000.000	24.204.687.535	93,08	12 Bulan	12 Bulan
	001 Gaji dan Tunjangan	22.527.000.000	21.005.262.635			
	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.476.000.000	3.206.387.100			
	J U M L A H	92.439.375.000	85.722.719.223	92,73		115,45

**Lampiran. 2 Keragaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian Tahun 2017**

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PROVINSI/KAB	PELAKSANAAN	TEMA
1.	Audit Kinerja			
	Inspektorat I	Pusat Jakarta, Jatim	April & Mei 2017	Audit Pelayanan Publik Permohonan Izin Pemasukan/Pengeluaran Benih dan Produk Hortikultura
		Pusat Jakarta	Juni 2017	Audit Ketaatan Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Kemtan Lingkup Sekjen Pada Biro Perencanaan, Pusdatin & Umum. Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan & Pelatihan Pertanian Lingkup BPPSDMP TA.2016 . Program Peningkatan Produksi & Nilai Tambah Hortikultura pada Lingkup Ditjen Hortikultura TA.2016.
	Inspektorat II	Jakarta, Jabar, Banten, Aceh, Sumut, Sumsel, Jateng, Jatim, Sulsel	Juni 2017	Audit Kinerja Kegiatan Subsidi Benih
		Pusat Jkt	Agts 2017	Audit Kinerja Keg PPHP & Keg Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya TA. 2016 Ditjen TP; Audit Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya & Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Mesin Pertanian TA. 2016 Ditjen PSP
		Sumut, Jambi, Banten, Sulbar, Bengkulu, Kalteng	Okt 2017	Audit Kinerja atas Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian TA 2016
		Gorontalo, Aceh, Jabar, Jateng, Sulsel, Sultra, NTB	Nop 2017	Audit Kinerja atas Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian TA 2016
		NTT, Sumut, DIY, Bali, Gorontalo	Nop 2017	Audit atas Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Hasil Tanaman Pangan TA 2016

	Inspektorat III	Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Kalbar, Kalsel, Sulsel, NTB	Maret 2017	Audit Kinerja Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) / Toko Tani Indonesia (TTI) TA.2016
		Kab. Majene, Kab. Alor, Kab. Bulukumba, Kab. Sigi	Juli 2017	Audit Kinerja Kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao
		Kalbar	Juli 2017	Audit Kinerja Kegiatan Pengembangan Kelapa Sawit di daerah Konflik dan Perbatasan
		Jabar	Sept 2017	Audit Ketaatan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan TA.2016
		Jabar, Kalbar, Sulsel	Sept 2017	Audit Pengelolaan Keuangan Program Penciptaan Teknologi & inovasi Pertanian Bio Industri Berkelanjutan TA.2016
		Maluku	Sept 2017	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan TA. 2016
		Babel, NTT, Sulteng, Jabar, Papua, DIY	Okt 2017	Audit Pengelolaan Keuangan Program Penciptaan Teknologi dan inovasi Pertanian Bio Industri Berkelanjutan TA.2016
		Kalteng, Banten, Jabar, Lampung, Riau, Bengkulu, Kalsel, Sumut, Jateng, Sultra	Nop 2017	Audit Pengelolaan Keuangan Program Penciptaan Teknologi dan inovasi Pertanian Bio Industri Berkelanjutan TA.2016
		Jabar, Kaltim, Sulsel, Jatim, Jateng	Des 2017	Audit Pengelolaan Keuangan Program Penciptaan Teknologi &inovasi Pertanian Bio Industri Berkelanjutan TA.2016
		Jatim, Kalsel, Sumbar, Kaltim, Sulbar	Des 2017	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan TA. 2016
		Kalteng, Kaltim, Sumbar	Des 2017	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat TA.2016
	Inspektorat IV	Papua, Sulut, Jatim	Sept 2017	Audit Ketaatan
		DIY, Papua, Sumut, Jatim, Jabar	Okt 2017	
		Kaltara, Kaltim,, Papua Barat, NTT, Sumbar, Jabar, Banten	Nop 2017	
		Jakarta, Kalsel, Riau, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Sulsel	Juni, Juli, Agts, Sep 2017	Audit Pelayanan Publik

2.	Audit PBJ			
	Inspektorat I	Sultra, Banten, Bengkulu, Sumut, Kab.Bogor, Kab.Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab.Bandung	Mei 2017	Audit PBJ Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura TA 2016 DK, TP
		Kab.Maluku Tengah, Kota Kep. Tidore, Kab.Gowa, Kab.Minahasa, Kab Merauke, Kab.Tambraw, Prov Aceh,Prov. Sulteng, Prov.Kalteng, Prov. Sumbar,Kab.Buleleng, Prov. Gorontalo, Prov. Kalbar, Kab. Banyuwangi, Kab. Bantul, Kab. Kubu Raya, Kalteng, Kab. Solok, Kab. Gorontalo, Kab. Donggala, Kab. Tabanan.	Nop 2017	Audit PBJ Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura TA 2016 TP, DK
		Kab.Kulonprogo, Kab.Bondowoso, Kab.Maros, Kab.Lampung Barat, Kab.Sumenep, Kab.Sumsel, Kab.Karanganyar, Kab.Merangin, Kab.Sleman, Kab.Sukabumi	Des 2017	Audit PBJ Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura TA 2016 TP
	Inspektorat II	Jambi, Lampung, Riau, Banten, Jabar, Kalsel, Kalteng, NTB	Mei 2017	Audit Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen Tanaman Pangan dana DK & TP
		Bengkulu, Kaltim, Sultra, Sulteng, Malut, Maluku	Agts 2017	Audit Pengadaan Barang/Jasa Benih Tanaman Pangan pada Satker (03) Tahun Anggaran 2016
		Bengkulu, Kaltim, Sultra, Sulteng, Malut, Maluku	Agts 2017	Audit Pengadaan Barang/Jasa Alat dan Mesin Pertanian pada Satker (03) Tahun Anggaran 2016
	Inspektorat III	Sumbar, Jabar, Jambi, NTB, Sumsel,Jatim, Serpong, Bogor	Mei 2017	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan
		Jambi, NTB, Sumbar, Lampung, Sumsel	Mei 2017	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan TA.2016
		Sulut, Gorontalo, Sultra, Kab. Kolaka, Kab.Konawe, Kab. Garut, Kab. Pohuwato, Jabar	Juni 2017	Program Peningkatan Produksi & Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan TA.2016
		Papua Barat, Sumut, Bali, Malut	Okt 2017	Program Peningkatan Produksi & Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan TA.2016
		Sulteng	Des 2017	Program Peningkatan Produksi & Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan TA.2016
	Inspektorat IV	Jatim, Sumsel, Sumut, Sulteng,	Mei 2017	Audit PBJ
		Jatim, Banten, Jabar, DKI Jakarta	Juni 2017	
		Kalsel, Sultra, DIY, Bali	Juli 2017	
		Bengkulu, Riau, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut	Agustus 2017	
		Sulsel, NTB, Papua	Sept 2017	
		Sumbar, Aceh, Sultra	Nop 2017	

3	Audit BMN			
	Inspektorat I	Lampung, Kaltim, Bali, Jambi, Jatim, NTB, Aceh	Jan 2017	Audit Barang Milik Negara terhadap barang yang diserahkan kepada masyarakat (526) dan Aset Tetap dalam Rangka Mendukung WTP
	Inspektorat II	Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Jateng, Jabar, NTT, NTB, Sulteng, Gorontalo, Sulut, Kalsel, Kalbar, Kalteng	Jan 2017	Audit BMN lingkup Ditjen TP & PSP
		Jatim, Jateng, Sulsel, DIY, Bali, Bengkulu, NTB, Kalbar, Sumbar, Papua, Sulbar, Kalteng, Riau, NTT	Peb 2017	Audit BMN lingkup Ditjen TP & PSP
		Sumut, Sumbar, Jabar, Jateng, Kalsel, Sulut, Jambi, Sumsel	Juli 2017	Audit BMN dalam rangka Hibah/ Penghapusan Aset Lingkup Ditjen TP utk mendukung Penyelesaian TL BPK-RI di Kementan dan Berkoordinasi dengan BPTP sebagai UAPPA/B-W dan Instansi terkait Lainnya
	Inspektorat III	Sultra, Jambi, Sulsel, NTT, NTB, Jabar, Kalsel, Kalteng	Jan 2017	Kegiatan Taman Teknologi Pertanian TA.2016
		Jabar, Aceh, Sumbar, Riau, Sumsel, Jateng, DIY, Bali, Kaltim	Feb 2017	Kegiatan Taman Teknologi Pertanian TA.2016
		Jatim (Kab. Situbondo, Ngawi & Madiun, Kediri & Kota Kediri & Tulungagung, Kab. Malang & Blitar, Tuban & Lamongan & Gresik, Sidoarjo & Pasuruan & Probolinggo)	Feb s.d Mar 2017	Dalam Rangka Hibah Ditjenbun
	Inspektorat IV	-	-	-
4	Pengawasan			
	Inspektorat I	Kab. Lombok Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab. Majalengka, Kab. Bandung, Kab. Magelang, Kab. Malang, Prov. Kalsel, Kab. Enrekang.	Sept 2017	Pengawasan Kegiatan dana APBNP lingkup Ditjen Hortikultura TA.2017
		Kab. Bandung, Kab. Cirebon, Kab. Lampung Selatan, Kab. Temanggung, Malang, Prov. Kalsel, Kab. Lombok Timur, Kab. Nganjuk, Prov. Kaltim.	Okt 2017	Pengawasan dana APBN-P Ditjen Hortikultura TA 2017
		Sumsel, Papua, Sumut, Riau, Jakarta	Okt 2017	Pengawasan Rekrutmen CPNS Tahap Seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) Kementan Tahun 2017
		Jakarta, Sumut, DIY, Jatim, Sulsel, Papua	Nop 2017	Pengawasan Rekrutmen CPNS Tahap Seleksi Tes Kompetensi Bidang (TKB) Kementan Tahun 2017

	Inspektorat II	Sumbar, NTB, Aceh, Lampung, Jabar, Jateng, Kalsel, Sulsel, Sulut	Okt 2017	Pembinaan SPIP Kegiatan Perluasan Areal Tanam Kedelai APBNP TA. 2017 Lingkup Ditjen TP
	Inspektorat III	Sulsel, Sultra, Lampung, Maluku, Jateng, Sumut, Jabar	Agts 2017	Pembinaan SPIP Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Melalui Pengadaan Benih Siap Salur Dana APBN-P TA.2017
		NTT, Jabar, Jateng, Jatim, Sumbar, NTB	Sept 2017	Pembinaan SPIP Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Melalui Pengadaan Benih Siap Salur Dana APBN-P TA.2017
		Jabar, Jateng, Jatim, Sumbar, NTB	Sept 2017	Pembinaan SPIP Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan melalui Penyiapan Benih Dana APBN-P
		Jatim, Jateng, Sumsel, Lampung, Sulsel	Nop 2017	Kegiatan Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tebu APBNP TA.2017 Lingkup Ditjen Perkebunan
	Inspektorat IV	Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Sulsel, Sumut	Mei 2017	Pengawasan Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) - UPSUS SIWAB TA.2017
		Jabar, Bali, Jateng, DIY, Lampung, Kalsel	Agts 2017	Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui APBNP TA.2017
5	Evaluasi			
	Inspektorat I	-	-	-
	Inspektorat II	Sumsel, Lampung, Kalteng, Kalbar, Sultra, Sulteng, NTT	Mar 2017	Evaluasi Cetak Sawah TA 2015 dan 2016
	Inspektorat III	-		
	Inspektorat IV	Sumut, Sumbar, Lampung, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Sulteng, Sulsel, NTT, NTB	Des 2017	Pengawasan Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) - UPSUS SIWAB

**Lampiran 3. Hasil Penilaian Mandiri Calon Unit Kerja Berpredikat ZI-WBK/WBBM
Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017**

NO	NAMA UNIT KERJA	NILAI	WBK
I. TINGKAT UNIT ESELON I			
1	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	81,89	LULUS
2	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	79,64	LULUS
3	BADAN LITBANG PERTANIAN JAKARTA	79,52	LULUS
4	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	77,37	LULUS
5	INSPEKTORAT JENDERAL	77,33	LULUS
6	BADAN KARANTINA PERTANIAN	77,21	LULUS
7	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	77,05	LULUS
8	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	76,07	LULUS
9	BADAN KETAHANAN PANGAN	75,53	LULUS
10	SEKRETARIAT JENDERAL	75,26	LULUS
11	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	75,13	LULUS
II. TINGKAT UNIT PELAKSANAAN TEKNIS			
1	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II JOGYAKARTA	86,19	LULUS
2	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAM	86,02	LULUS
3	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	86,00	LULUS
4	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI	85,74	LULUS
5	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG	84,70	LULUS
6	BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI BOGOR	84,44	LULUS
7	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN	84,40	LULUS
8	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SURABAYA	83,70	LULUS
9	BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURADEN	83,66	LULUS
10	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU	83,34	LULUS
11	PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA	83,01	LULUS
12	BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS SERAT MALANG	82,95	LULUS
13	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN TANJUNG PRIOK	82,72	LULUS
14	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA BOGOR	82,43	LULUS
15	SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MEDAN	81,95	LULUS
16	BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA GENETIK PERTANIAN BOGOR	81,68	LULUS
17	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II BALIKPAPAN	81,65	LULUS
18	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN BOGOR	81,64	LULUS
19	BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBAENG	81,27	LULUS
20	BALAI VETERINER BANJARBARU	80,78	LULUS
21	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR	80,63	LULUS
22	BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG	80,29	LULUS
23	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN BOGOR	80,18	LULUS
24	PUSAT PENELITIAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN CIAWI	79,97	LULUS
25	SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MAGELANG	79,82	LULUS

26	BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONG BORONG	79,79	LULUS
27	BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEBANGAN PASCA PANEN BOGOR	79,06	LULUS
28	BALAI PENELITIAN TANAH BOGOR	78,99	LULUS
29	PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN	78,63	LULUS
30	BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI SUKAMANDI	78,51	LULUS
31	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR	78,39	LULUS
32	BALAI BESAR PENGEMBANGNA PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA CIMANGGIS	78,39	LULUS
33	BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN BOGOR	78,38	LULUS
34	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN BOGOR	78,16	LULUS
35	BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR	77,85	LULUS
36	BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN BEKASI	77,34	LULUS
37	BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI SERPONG	77,23	LULUS
38	BALAI BESAR VETERINER WATES	76,58	LULUS
39	BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN LEMBANG	76,34	LULUS
40	BALAI PENELITIAN LINGKUNGAN PERTANIAN JAKENAN	76,33	LULUS
41	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR	76,13	LULUS
42	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN BOGOR	76,11	LULUS
43	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA	75,96	LULUS
44	PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN BOGOR	75,73	LULUS
45	BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT BOGOR	75,70	LULUS
46	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNG SINDUR	75,67	LULUS
47	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG	75,26	LULUS

Sumber data: Inspektorat Investigasi, 2017

Lampiran 4. Keragaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2017

Uraian Pengadaan	Volume	Pagu Awal		Pagu Revisi		Penawaran		Realisasi		Sisa Pagu	Ket
		Harga Satuan	Jumlah								
I. Pengadaan Sistem Informasi Pengawasan											
Pengadaan Jasa Desain Aplikasi Sistem Informasi Itjen	1 paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	49.142.210	49.142.210	48.958.470	48.958.470	1.041.530	PT. Gading Persada Mandiri
Pengadaan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Itjen	1 paket	450.000.000	450.000.000	357.000.000	357.000.000	308.000.000	308.000.000	308.000.000	308.000.000	49.000.000	PT. Biner Teknologi Indonesia
			500.000.000		407.000.000		357.142.210		356.958.470	50.041.530	
II. Pengadaan Alat Pengolah Data											
Printer Label	2 unit	7.500.000	15.000.000	7.500.000	15.000.000	6.690.000	13.380.000	6.550.000	13.100.000	1.900.000	PT. Bhineka Mentari
Media Data Digital/Alat	5 unit	8.100.000	40.500.000	8.100.000	40.500.000	6.929.000	34.645.000	6.900.000	34.500.000	6.000.000	-
Microsoft Office	45 unit	11.060.625	497.728.125	6.350.000	285.750.000	6.500.000	292.500.000	6.350.000	285.750.000	-	Dimensi
			553.228.125		341.250.000		340.525.000		333.350.000	7.900.000	
III. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran											
Lemari Besi	5 unit	7.500.000	37.500.000	7.500.000	37.500.000	6.563.040	32.815.200	6.152.850	30.764.250	6.735.750	PT. Datascrip
Kursi Tunggu	1 unit	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.252.480	3.252.480	3.187.107	3.187.107	362.893	
Meja Rapat	20 unit	3.000.000	60.000.000	3.000.000	60.000.000	2.632.960	52.659.200	2.468.400	49.368.000	10.632.000	
			101.050.000		101.050.000		88.726.880		83.319.357	17.730.643	
IV. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran											
Digital Voice Recorder	2 unit	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	1.860.000	3.720.000	1.860.000	3.720.000	280.000	PT. Bhineka Mentari
Handy Talky	6 unit	1.500.000	9.000.000	1.500.000	9.000.000	1.090.500	6.543.000	1.249.500	7.497.000	1.503.000	Dimensi
			13.000.000		13.000.000		10.263.000		11.217.000	1.783.000	
V. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran											
Mesin Jilid	1 unit	14.550.000	14.550.000	14.550.000	14.550.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	50.000	CV. Perdana
Dispenser	4 unit	2.655.000	10.620.000	2.655.000	10.620.000	2.650.000	10.600.000	2.645.000	10.580.000	40.000	
Tripod	1 unit	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	5.000	Cipta Sejahtera
Portable Amplifier Speaker	1 unit	15.250.000	15.250.000	15.250.000	15.250.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	50.000	
Trolley	2 unit	2.575.000	5.150.000	2.575.000	5.150.000	2.525.000	5.050.000	2.515.000	5.030.000	120.000	
Tangga Aluminium	1 unit	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	50.000	
Tangga Telescopic	1 unit	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	-	
			51.050.000		51.050.000		50.775.000		50.735.000	315.000	
VI. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran											
Karpet	120 m2	285.000	34.200.000		34.200.000		33.976.800		33.976.800	223.200	
			34.200.000		34.200.000		33.976.800		33.976.800	223.200	

VII.	Pengadaan Kendaraan Dinas Eselon I	1 unit	702.970.000	702.970.000	-	499.380.000	499.380.000	499.380.000	499.380.000	(499.380.000)	PT. Astra International Tbk	
			702.970.000		-	499.380.000		499.380.000		(499.380.000)		
VIII.	Pengadaan Kendaraan Roda Dua Ops. Kantor	2 unit	24.013.000	48.026.000	-	19.585.000	39.170.000	19.585.000	39.170.000	(39.170.000)	PT. Astra International Tbk	
			48.026.000		-	39.170.000		39.170.000		(39.170.000)		
IX.	Pengadaan Seragam Dinas	303 set	199.550.000	199.550.000	649.440	196.780.320	641.960	194.513.880			CV. Putra Amiras Jaya	
			199.550.000	199.550.000		196.780.320		194.513.880				
X.	Pengadaan Alat Pengolah Data											
	Personal Komputer dan Ms. Office	31 unit	12.000.000	372.000.000	9.799.525	303.785.275	9.899.500	306.884.500	9.799.500	303.784.500	775	PT. Astra Graphia Xprins Indonesia
	Scanner Portable	1 unit	13.500.000	13.500.000	11.900.000	11.900.000	11.999.800	11.999.800	11.899.800	11.899.800	200	
	Mesin Foto Copy	1 unit	70.000.000	70.000.000	59.299.000	59.299.000	59.399.000	59.399.000	59.299.000	59.299.000	-	
			455.500.000		374.984.275		378.283.300		374.983.300		975	
XI.	Pengadaan Alat Pengolah Data											
	Tablet	1 unit	8.000.000	8.000.000	-	5.264.000	5.264.000	5.264.000	5.264.000	(5.264.000)		CV. Ganesh Adi Perkasa
			8.000.000		-	5.264.000		5.264.000		(5.264.000)		
XII.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran											
	Nebulizer	1 unit	563.000	563.000	563.000	563.000	690.000	690.000	690.000	690.000	(127.000)	
	Alat Pemeriksaan Asam Urat	1 unit	500.000	500.000	500.000	500.000	583.000	583.000	583.000	583.000	(83.000)	
	Alat Pemeriksaan HB	1 unit	500.000	500.000	500.000	500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	(600.000)	
	Alat Pemeriksaan HDL, LDL	1 unit	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	240.000	
	Alat Pemeriksaan Kolesterol	1 unit	562.000	562.000	562.000	562.000	660.000	660.000	660.000	660.000	(98.000)	
	Alat Blender obat Puyer Anak	1 paket	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	846.000	PT. Maju Mandiri
	Alat Pemeriksaan Kanker Payudara	1 unit	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	1.581.250	1.581.250	1.581.250	1.581.250	2.168.750	
	Alat Pemeriksaan Tekanan Darah	1 unit	750.000	750.000	750.000	750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	(2.000.000)	
			12.926.000		12.926.000		12.579.250		12.579.250		346.750	
XIII.	Pengadaan Alat Pengolah Data											
	Mini PC	1 unit	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	CV. Putra Amiras Jaya
	Notebook	1 unit	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	1.000.000	
	MS. Office Pro Plus 2016	1 unit	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	500.000	
			39.500.000		39.500.000		38.000.000		38.000.000		1.500.000	
IX.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran											
	Televisi	1 unit	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	50.000	
	Kursi Pimpinan	1 unit	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.575.000	6.575.000	6.575.000	6.575.000	(3.575.000)	
	AC	2 unit	6.604.850	13.209.700	6.604.850	13.209.700	3.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	7.209.700	CV. Jaya Sentosa
	Kulkas	1 unit	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	-	
	Sepeda Statis	2 unit	7.250.000	14.500.000	7.250.000	14.500.000	7.200.000	14.400.000	7.200.000	14.400.000	100.000	
			41.109.700		41.109.700		37.325.000		37.325.000		3.784.700	
XV.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran											
	Tempat Tidur	3 unit	3.500.000	10.500.000	3.500.000	10.500.000	3.450.000	10.350.000	3.450.000	10.350.000	150.000	CV. Ganesh Adi Perkasa
	Lemari Kayu	2 unit	4.000.000	8.000.000	4.000.000	8.000.000	3.850.000	7.700.000	3.850.000	7.700.000	300.000	
			18.500.000		18.500.000		18.050.000		18.050.000		450.000	
	Total		2.778.609.825				2.106.240.760		2.088.822.057	(459.738.202)	75,18	

Sumber Data: dari Bagian Keuangan & Perlengkapan